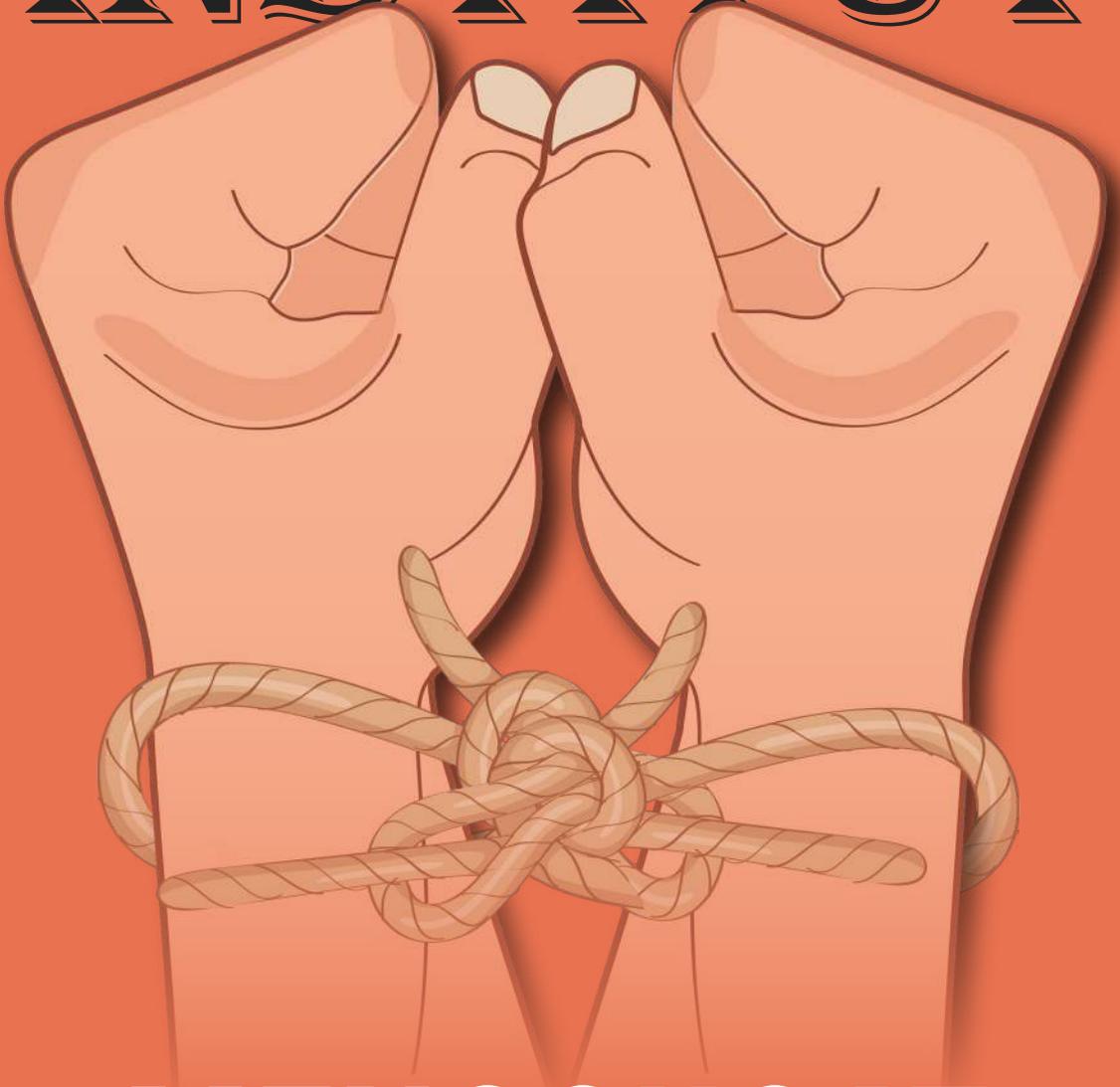


MENIMBANG PERPPU HUKUMAN KEBIRI
INSTITUT



MENGGUGAT
KEBEBASAN HAM

MAJALAH INSTITUT

EDISI 42

LPMINSTITUT.COM



Salam Redaksi

Apa kabar pembaca setia *Institut*? Pada tahun 2017 ini, kepengurusan kami sebagai pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut 2016 berakhir. Kenangan organisasi di LPM Institut tentu menjadi pelajaran berharga bagi kami semua. Kini, sebagian dari kami mungkin tengah mempersiapkan petualangan baru setelah tunai menyelesaikan tugas di LPM Institut.

Di akhir kepengurusan, Tim Majalah Institut 2016 dengan bangga menghadirkan *Majalah Institut* edisi ke-42 kepada pembaca. Sempat tak beredarnya *Majalah Institut* sejak tahun 2014, melecut semangat kami dalam menyelesaikan tugas terakhir ini.

Proses penggarapan *Majalah Institut* kali ini tidaklah mudah. Perasaan putus asa dan lelah sempat kami alami selama proses penggarapan produk ini. Fokus penggarapan *Majalah Institut* juga sempat terpecah lantaran adanya kewajiban akademis yang harus kami selesaikan. Namun, itu bukan alasan untuk tak menghadirkan *Majalah Institut*.

Menyuarakan kebebasan, keadilan, dan kejujuran selalu menjadi motto kami dalam menghadirkan produk Institut. "Lantas, apakah pesan yang ingin kami sampaikan kepada pembaca dalam *Majalah Institut*?" kiranya itulah pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran kami. Bukan Tim Majalah Institut 2016 yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Namun, kami percaya lewat tulisan kami selalu menghendaki perubahan. Jangan pernah berhenti melawan.

Redaksi



LPMINSTITUT.COM



@XBR4277P



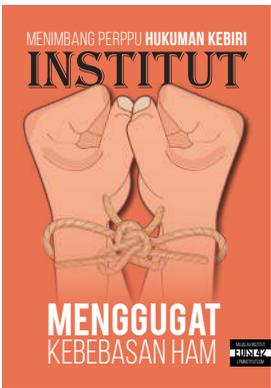
LPM INSTITUT - UIN JAKARTA



@LPMINSTITUT



@LPMINSTITUT



Ilustrasi Sampul oleh Jeanni dan Rizal

LAPORAN UTAMA
MENOLAK LUPA KASUS HAM **18**

LAPORAN KHUSUS
DUA MATA PISAU PERAN GANJA **33**

OPINI
MENYOAL KEBEBASAN BERAGAMA **40**
POSISI MANUSIA DI ERA KNOWLEDGE SOCIETY **42**
KASUS HAM DI PERSIMPANGAN JALAN **44**
PERSPEKTIF PERS MAHASISWA INDONESIA **46**

KESEHATAN
TEROR ZIKA **54**

KOMUNITAS
MENEMBUS BATAS MELESTARIKAN MANGROVE **57**

MUSIK
HASILKAN KARYA INDEALIS **59**

RESENSI BUKU
PENERAPAN SYARIAH MENUAI PRO KONTRA **72**

SURVEI
WARUNG MAKAN FAVORIT MAHASISWA **74**

TEKNOLOGI
GAYA BARU MEDIA MENGOLAH BERITA **76**

BUDAYA
CERITA AKULTURASI DARI LOMBOK **78**

SENI
MEMAKNAI GORESAN JUANG KEMERDEKAAN **82**

CERPEN
GORENGAN PUITIS **86**

LENSA
SISA-SISA KEJAYAAN BUARAN THEATRE **88**

LAPORAN KHUSUS

ADVOKASI GANJA TAK TEMUI TITIK TERANG **29**

RESENSI FILM



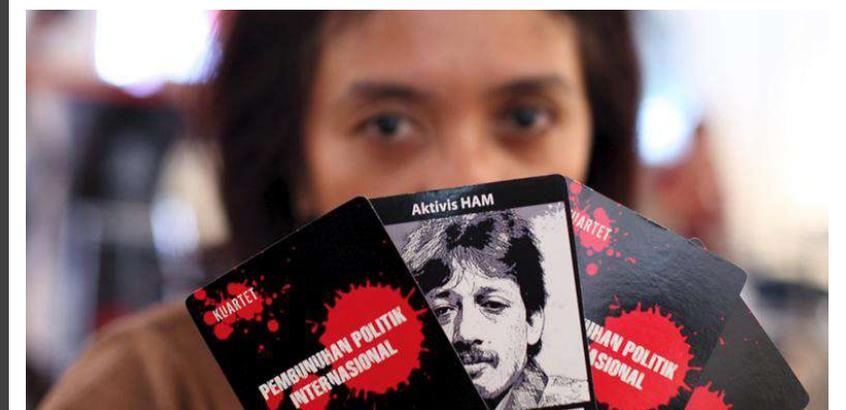
Whiskey Tango Foxtrot

68



PERJALANAN **70** Menapaki Sejarah Kerajaan Melayu

LAPORAN UTAMA **8**



PENYELESAIAN KASUS HAM JANJI BELAKA

Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum ditindak. Penegakan hukum lamban, tak ada penyelesaian berarti.

48



LAPORAN KHUSUS



LAPORAN UTAMA INTOLERANSI AGAMA MEMANAS **22**



HUKUM MENIMBANG PERPPU HUKUMAN KEBIRI

48



MUSIK **63**
BAND INDIE PILIHAN INSTITUT



LAPORAN UTAMA WAWANCARA **64**

BUDAYA HILANG, SALAH SIAPA?



LAPORAN UTAMA POTRET KEKERASAN PEREMPUAN **26**

INSTITUT

Pemimpin Umum

Erika Hidayanti

Pemimpin Litbang Yasir Arafat
Bendahara Umum Triana Sugesti
Sekretaris umum Syah Rizal
Pemimpin Redaksi Arini Nurfadilah

Riset dan Dokumentasi Ika Puspitasari
Pemimpin Perusahaan Jeannita Kirana
Redaktur Online M. Rizky Rakhmansyah

Tim Majalah

Pemimpin Redaksi Arini Nurfadilah

Reporter Instituters

Fotografer Instituters

Editor Instituters

Ilustrasi Sampul Jeannita & Syah Rizal

Desain Visual & Tata Letak Syah Rizal

Fotografer INSTITUTERS Singgih A. Dani (Kontributor)

Fotografer Tustel Fakhri Hermansyah (Kontributor)

Anggota

Staf BPH Lya Syam Arif

Staf Redaksi Dicky Prastya
Jannah Arijah
Yayang Zulkarnaen

Staf Litbang Aisyah Nursyamsi
Zainuddin Lubis

Staf Perusahaan Eko Ramdani
Eli Murtiana

Temukan Kami

Alamat Redaksi Gedung Student Center Lt. 3,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jl. Ir. H. Juanda Nomor 95
Ciputat, Tangerang Selatan

Telepon 085892180540

Email redaksi.institut@gmail.com

Website lpminstitut.com



Pada Akhirnya,
DISIPLIN VERIFIKASI
adalah yang memisahkan
JURNALISME DARI
HIBURAN, PROPAGANDA, FIKSI, ATAU SENI

BILL KOVACH, PENULIS BUKU 9 ELEMEN JURNALISME

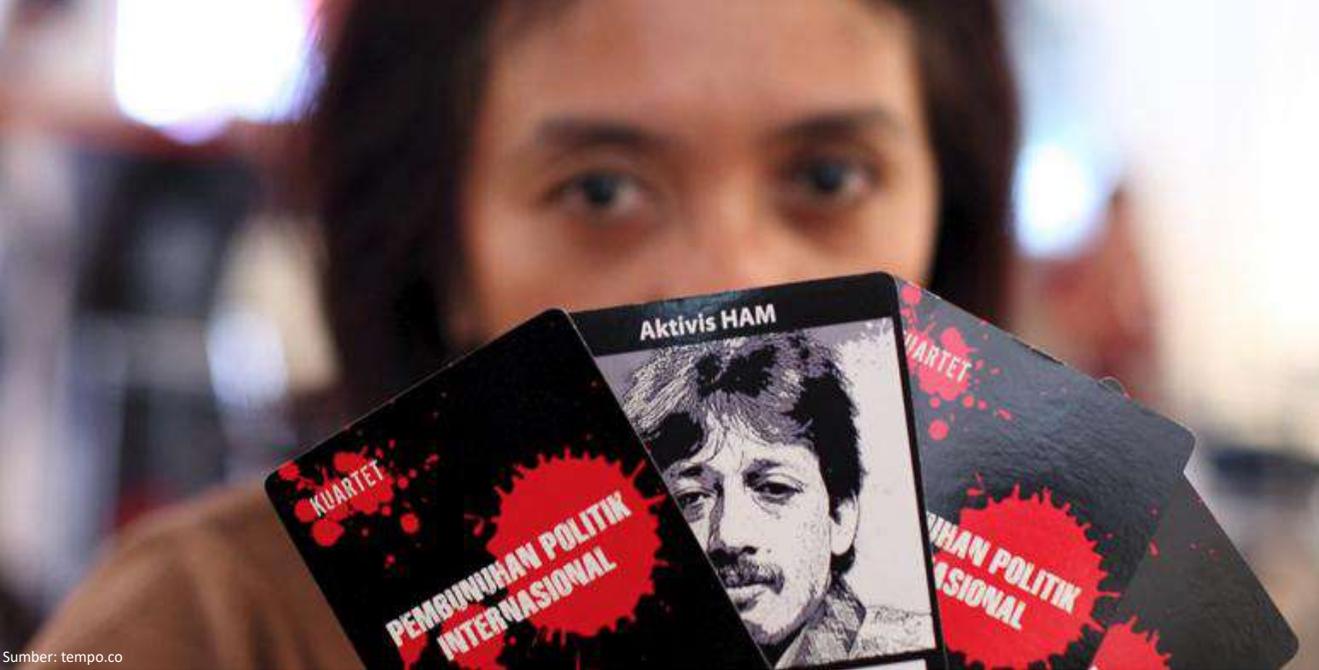
PENYELESAIAN KASUS HAM **JANJI BELAKA**

Triana Sugesti

Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum ditindak. Penegakan hukum lamban, tak ada penyelesaian berarti.



Sumber: pabirikfoto.blogspot.com



Sumber: tempo.co

TERIK matahari tak menyurutkan niat Maria Katarina Sumarsih untuk berdiri di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Akrab disapa Sumarsih, ia adalah ibu dari Bernardus Realino Norman Irmawan (Wawan) korban tragedi Semanggi I. Lengkap memakai pakaian serba hitam, ibu dua anak ini berdiri ditemani oleh keluarga korban HAM lainnya dan dari kalangan yang peduli akan adanya penegakan HAM.

Payung hitam memang identik dengan unjuk rasa rutin yang belakangan disebut aksi Kamis-an. Sejak dilangsungkan pertama kali 18 Januari 2007 lalu, wanita berambut pendek dengan dominasi putih inilah yang selalu hadir mengikuti aksi yang saban Kamis sore diadakan. "Saya ingin merasakan apa yang Wawan dulu lakukan hingga kepergiannya," ungkap Sumarsih kepada *Institut Kamis* (12/1/17).

Menurut cerita saksi mata, kata Sumarsih melanjutkan, pada Jumat sore tepatnya 13 November 1998, Wawan sedang bertugas menjaga dari pihak tim relawan kemanusiaan. Mulanya, Wawan meminta izin kepada aparat TNI

yang sedang bertugas guna menolong mahasiswa yang tertembak pistol. Namun, saat Wawan sudah mengeluarkan bendera putih sebagai tanda pertolongan, Wawan pun ikut tertembak tepat di halaman kampus Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Jakarta.

Karena ditembak peluru tajam di bagian dada sebelah kiri lalu mengenai jantung dan paru-paru, nyawa Wawan tak terselamatkan oleh tim medis. "Saat itu, telepon rumah berdering, mengabarkan Wawan masuk Rumah Sakit (RS), Saya pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya, Wawan sudah berada dalam keranda lengkap ditutup kain putih," keluh Sumarsih.

Pada saat kejadian, siang itu kabar pengumuman dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, bahwa semua gedung, meliputi sekolah, kantor, dan tempat perbelanjaan untuk sementara ditutup. Sumarsih menuturkan, saat dirinya menuju RS semua jalan dijaga ketat oleh Polisi, TNI dan Tentara. Padahal, ia telah menceritakan alasan untuk melewati jalan tersebut. Percaka-

pan sempat dihiasi perdebatan kala itu, namun nihil Sumarsih tetap tidak diizinkan melewati jalan yang merupakan jalan terdekat menuju RS.

"Seusai mendapati Wawan sudah tidak bernyawa, saya pun segera membawa Wawan pulang dan untuk mempercepat kepulangan, saya langsung ke bagian administrasi. Namun ternyata biaya Wawan sudah ada yang melunasi. Jenazah Wawan harus diotopsi untuk hasil penyelidikan," tutur Sumarsih.

Hari-hari pun berlalu, saat itu Sumarsih mengambil cuti tiga bulan lamanya. Sembari menunggu kabar terbaru, ia tak pernah absen membaca harian Kompas. Pada akhir bulan November 1998, pemerintah memberi bantuan berupa uang. "Karena bingung mau buat apa, uang itu saya disumbangkan kepada orang yang menembak Wawan, pokoknya saya enggak mau pegang," ungkap Sumarsih dengan nada kesal.

Sampai pada akhirnya, Sumarsih berencana mencari hasil otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya putra pertamanya. Awal mula, ia mengunjungi Komando Daerah Militer Jayakar-

ta, sayang hasilnya belum bisa diserahkan dengan alasan belum ada sidang terkait kasus tersebut. Menurut Sumarsih, banyak kejanggalan yang sengaja ditutupi dalam kasus itu, karenanya, ia berkomitmen turun ke jalan dan ikut bergabung tim relawan kemanusiaan. "Aksi Kamis ini cara kami bertahan untuk berjuang membuka fakta kebenaran melawan lupa," tuturnya.

Kemudian, lahirlah Undang-Undang (UU) yang mengatur penyelesaian pelanggaran HAM berat yaitu UU Nomor 26/2000 Tentang Pengadilan HAM. Pasal 43 (1) menyatakan bahwa "Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*".

Adapun penanganan kasus bagi Sumarsih tak ada kejelasan yang berarti. Pada bulan Maret 2002 Komnas HAM telah melakukan penyelidikan lalu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, dari Kejaksaan Agung berkali-kali mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan berbagai alasan. Ada yang menyebutkan bahwa hasil penyelidikan dianggap hanya transkrip dan sulit mencari bukti karena kasusnya sudah terlalu lama.

Sumarsih menerangkan, pada 13 Maret 2008 berkas penyelidikan Komnas HAM atas kasus Trisakti Semanggi I dan II dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman, namun, setelah dilaporkan kepada Presiden SBY dalam pertemuan dengan keluarga korban pada 26 Maret 2008, Kepala Pusat Penegakan Hukum dalam konferensi pers pada 27 Maret 2008 menyatakan tidak hilang. "Kan kalau kayak gini pemerintah

sendiri yang malu," katanya.

Komitmen Presiden RI Joko Widodo saat kampanye Pemilu Capres tahun lalu, bagi Sumarsih masih menjadi harapan kosong. Hal tersebut dikarenakan belum adanya upaya dan tindakan yang pasti dalam menangani kasus tersebut. Terlampir dalam nawacita berbunyi "*Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia seperti: kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965*".

Ungkapan kekecewaan pun dirasakan sama oleh istri almarhum Munir Said Thalib yakni Suciwati. Ia menilai pemerintah saat ini tidak memiliki kemauan untuk mengungkap atau menyelesaikan kasus-kasus HAM. "Kalau Jokowi kemarin memberi pernyataan telah mengumpulkan para penegak hukum lalu mencari solusi kelanjutan kasusnya. Tapi mana dan apa hasilnya?" tuturnya saat dihubungi lewat telepon genggam, Jumat (20/1/17).

Suciwati mengatakan, upaya yang dilakukan keluarga korban sepertinya tak terlihat oleh pemerintah. "Pokoknya semua hanya wacana yang mereka bilang kalau mereka peduli, hari ini pemerintah tidak melakukan apa-apa, pun sampai ada kabar bahwa dokumennya hilang. Ini yang menjadi kegagalan pemerintah dalam menangani kasus-kasus HAM," ungkapnya.

Kekesalan yang dirasa Suciwati bertambah saat mengetahui Jokowi berteman dengan orang-orang yang jelas terduga melanggar HAM. "Misalkan saja,

Wiranto saat ini sudah digadag menjadi Ketua Dewan Kerukunan Nasional. Ini mungkin jalan mereka mencari selamat dari ranah hukum," ujarnya.

Menyinggung permasalahan HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) turut berperan dalam setiap kasus HAM. Divisi Peman-tauan Impunitas, Tioria Pretty Stephanie menuturkan, Kontras selalu mendampingi keluarga korban dalam menangani berbagai kasus HAM. "Kita sebagai penghubung antara keluarga korban dengan pemerintah, jadi kalau ada apa-apa langsung diinformasikan," ujar wanita yang juga turut menghadiri aksi Kamis 12 Januari lalu.

Menurut Pretty, pemerintah belum maksimal dalam menangani atau menindaklanjuti kasus-kasus HAM. Hal itu terbukti dengan adanya UU Nomor 26/2000 Tentang Pengadilan HAM, hukum belum juga ditegakkan. "Pemerintah nampak tidak terlalu serius menanggapi kasus itu, padahal sudah jelas kan UU nya," kata Pretty.

Selain Kontras, aktivis yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun ikut berupaya membantu menegakkan keadilan. "Latar belakang LBH kan lembaga bantuan hukum, perannya yang pasti menemani korban menyelesaikan kasus lewat jalur hukum atau pengadilan," ungkap Asta sebagai Anggota Bidang Kampanye Strategis, Kamis (12/1/17).

Asta bercerita, saat kasus Munir, LBH menolak pembebasan Pollycarpus dengan cara menggugat surat keputusan pembebasan bersyarat. "Sebagaimana laporan tim pencari fakta munir tidak kunjung ditemukan oleh negara.

Kita maju menggugat negara agar negara segera menemukan laporan penyelidikan kasus Munir,” katanya.

Menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengungkapkan, hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yaitu ada banyak pejabat yang masih menjabat dan berindikasi akan dirugikan kalau kasus ini terungkap. “Saya tidak bilang pejabat tersebut terbukti terlibat, karena yang berwenang mengatakan keterlibatan yaitu hanya pengadilan,” tuturnya, Rabu (25/1/17).

Komnas HAM, lanjut Imdadun, terus berusaha untuk menindaklanjuti perkara ini. Namun, dukungan politiknya tidak kuat, Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sepihak harus memiliki izin dari pemerintah pusat. Lalu, Komnas HAM mencari alternatif baru yaitu dengan cara rekonsiliasi. “Penyelesaian kasus HAM tidak melalui pengadilan, semua korban saksi bercerita dan pelakunya minta maaf, seperti musyawarah, hak-hak dari korban harus dikembalikan seperti nama baik,” ungkapnya.

Namun, kata Imdadun, untuk mencapai musyawarah, mula-mula harus ada persetujuan dari keluarga korban. Faktanya, kalau dibawa ke pengadilan akan rumit. Alternatif penyelesaiannya yaitu adanya rekonsiliasi. “Ini juga belum ada persetujuan dari pemerintah, intinya jangan di-diamkan kasus ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, *Institut* masih berupaya meminta konfirmasi ke bagian Humas Menko Polhukam dan pemerintah pusat. Namun, sejauh ini belum ada respons dari pihak terkait.



Sumber: rappler.com

KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU YANG BELUM DIPROSES HUKUM

No	Nama Kasus	Th	Jumlah Korban	Keterangan
1	Pembantaian massal 1965	1965-1970	1.500.000	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah
2	Penembakkan misterius "Petrus"	1982-1985	1.678	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
3	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4	Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976-1989	Ribuan	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5	Kasus-kasus di Papua	1966-2007	Ribuan	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local
6	Kasus Dukun Santet Banyuwangi	1998	puluhan	Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.
7	Kasus Marsinah	1995	1	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan.
8	Kasus Bulukumba	2003	2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan luka-luka.	Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

Sumber: kontras

KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERTUNDA DI KOMNAS HAM DAN JAKSA AGUNG

No	Kasus	Th	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian	Keterangan
1	Talangsari Lampung	1989	803	Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan	Komnas HAM membentuk KPP tahun 2001, tim pengkajian di tahun 2004 dan 2005	Salah seorang yang diduga paling bertanggungjawab menjabat Kepala BIN sehingga sulit tersentuh.
2	Penembakan mahasiswa Trisakti	1998	685	Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2002	onis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
3	Mei 1998	1998	1.308	Kerusuhan social di Jakarta yang menjadi momentum peralihakekuasaan	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2003	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut
4	Semanggi I	1998	127	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2002	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
5	Semanggi II	1999	228	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak UU Negara dalam Keadaan Bahaya	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2002	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
6	Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikkan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, November 2006	Jaksa Agung menyatakan tidak akan melakukan penyidikan atas kasus ini karena belum ada pengadilan HAM Adhoc.

Sumber: kontras



LAPORAN UTAMA

MENOLAK LUPA KASUS HAM

Jeannita Kirana

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat tidaklah mudah. Komunitas pembela HAM membantu korban mencari keadilan.

HAM menjadi isu hangat di Tanah Air sampai sekarang. Kasus-kasus pelanggaran HAM banyak terjadi mulai dari pelosok daerah hingga Ibu Kota. Sosok-sosok pembela HAM pun mulai bermunculan. Mereka tampil baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas.

Salah satu kelompok pembela HAM di Indonesia ialah Kontras. Organisasi yang memiliki kepanjangan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ini dibentuk pada 20 Maret 1998 oleh sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat.

Pada awalnya, Kontras didirikan dengan tujuan untuk menangani kasus-kasus orang hilang dan tindak kekerasan pada zaman orde baru. Dalam perkembangannya, banyak korban di luar kasus tersebut yang meminta bantuan kepada Kontras. Sehingga Kontras juga menangani beragam kasus seperti tindak kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, Timor-Timur, Maluku, Sambas, Sampit dan Poso, serta pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Kontras berperan membantu advokasi penyelesaian kasus yang telah diadukan oleh para korban. Dengan visi yang diusung Kontras yaitu terwujudnya demokrasi yang berbasis keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Divisi Pemantauan Impunitas, Tioria Pretty Stephanie menjelaskan, Kontras membantu para korban pelanggaran HAM dengan bertindak sebagai pendamping. “Jika ada perkembangan terbaru kami langsung kasih tahu kor-

ban. Tapi semua balik lagi ke para korban. Mereka juga dituntut untuk selalu aktif,” ujarnya, Kamis (12/1/17).

Dalam memperjuangkan HAM, Kontras menemui berbagai tantangan. Pertama, Kontras harus mengingatkan kembali pada masyarakat agar tidak melupakan kasus-kasus HAM yang belum usai sampai saat ini. Kedua, mengingatkan pemerintah bahwa kasus pelanggaran HAM adalah permasalahan hukum bukan politik.

“Lantaran kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu sudah sangat lama terjadi dan kasus-kasus yang baru muncul, akhirnya masyarakat langsung lupa. Lalu, selama ini pemerintah pun malah membawa kasus pelanggaran HAM ke ranah politik. Sehingga persoalan HAM tidak kunjung selesai,” kata Pretty.

Selain itu, ada pula Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang membantu terwujudnya penegakan HAM bagi para korban pelanggaran HAM. LBH Jakarta resmi didirikan pada 28 Oktober 1970. Lembaga yang sudah berumur 47 tahun ini ditujukan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang tidak mampu memperjuangkan haknya dan membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Hingga sekarang terdapat 5.905 laporan masuk yang diperoleh LBH Jakarta selama lima tahun belakangan ini dengan total jumlah pencari keadilan sebanyak 300.762 orang. Ketika menjalankan tugasnya, LBH mendampingi para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum.

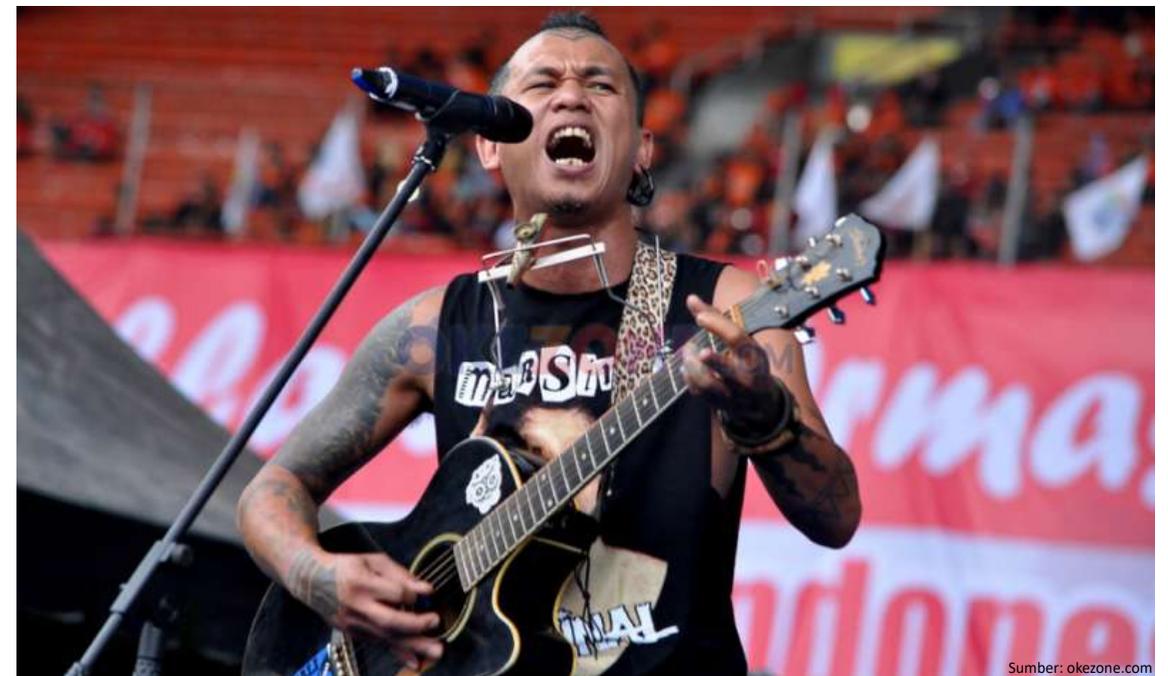
Contoh kasus yang dikerjakan oleh LBH Jakarta ialah pemulihan nama baik. Ketika itu

ada seorang wanita yang dituduh sebagai salah satu anggota Gerakan 30 September (G 30S) padahal ia hanyalah seorang penyanyi. “Alhasil beliau dipenjara tanpa proses pengadilan. Akhirnya LBH Jakarta membantu mengatasi kejahatan negara yang dilakukan atas wanita tadi dengan cara mendampinginya untuk mendesak pemulihan nama baik,” jelas Anggota Bidang Kampanye Strategis LBH Jakarta, Asta, Kamis (12/1/17).

Tak hanya itu, 2015 lalu, LBH Jakarta juga menolak pembebasan Pollycarpus Budihari Priyanto atas kasus pembunuhan Munir. LBH Jakarta menggugat surat keputusan pembebasan bersyarat Pollycarpus. Pada akhir 2016 kemarin, ketika laporan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir dinyatakan hilang, LBH Jakarta mendesak negara untuk segera menemukan laporan TPF tersebut.

Berdasarkan asas klien, LBH Jakarta tak putus asa untuk membantu para korban dalam mencari keadilan. Sebab, masyarakat tak bisa hanya menunggu aksi dari pemerintah. Menurut Asta, pemerintah tak memiliki keseriusan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Sekalipun ada niat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, saya anggap itu hanya *akal-akalan* negara saja. Karena memang sedari awal tidak ada keinginan korban yang betul-betul dijalankan oleh negara,” tuturnya.

Indonesia mempunyai sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan



Sumber: okezone.com

terhadap pelanggaran HAM berat.

Terkait adanya kelompok masyarakat yang ikut membela HAM, Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan, usaha mendukung HAM dari para korban dan masyarakat merupakan hal yang positif. “Mereka juga koleganya Komnas HAM dalam mengadakan advokasi. Penting sekali untuk terus mengingatkan pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan,” terang Imdadun, Rabu (25/1/17).

Sementara itu, komunitas diskusi bernama Lentera HAM turut membahas isu terkait hukum dan HAM. Komunitas yang diketuai oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rausyan Fikri Muhammadiyah ini mempelajari serta mendukung setiap langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Komunitas yang berdiri pada 28 Oktober 2015 di Ciputat ini

dengan aktif mengawal kasus-kasus terkait HAM seperti pengusuran kampung nelayan di Kampung Baru Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Lentera HAM mempunyai kegiatan rutin tahunan bernama Pesantren Ramah HAM. *Workshop* yang berlangsung selama tiga hari itu diselenggarakan dengan mengajarkan pendidikan dasar HAM kepada para peserta.

“Kami selalu mendukung setiap langkah pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara transparan dan adil. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh tinggal diam ketika melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Apalagi kita mahasiswa, pemerintah juga tidak bisa bergerak sendirian tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat,” papar Rausyan.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang ikut membela HAM dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka memperjuangkan HAM melalui musik. Salah satunya grup musik beraliran punk rock, Marjinal. Grup musik yang berdiri sejak

1997 ini menciptakan lagu-lagu yang mengandung kritik sosial atas keadaan masyarakat Indonesia.

Misalnya saja lagu berjudul *Marsinah* yang terinspirasi dari buruh perempuan bernama Marsinah yang berjuang demi mendapatkan hak-haknya. Kemudian ada lagu berjudul *Hukum Rimba*, berisi kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Grup musik Marjinal berharap dengan hadirnya mereka, mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya HAM.

Mengenai kondisi hukum di Indonesia, vokalis grup musik Marjinal, Mike, angkat bicara. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan. “Indonesia *kan* negara hukum. Tapi permasalahan hukum malah berubah menjadi permasalahan politik. Tidak ada suatu kejelasan dan penuntasan atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar pun sudah jelas, baik masyarakat maupun pemerintah tanpa terkecuali sama posisinya di hadapan hukum,” tutupnya, Jumat (20/1/17).

LAPORAN UTAMA



INTOLERANSI AGAMA MEMANAS

Arini Nurfadilah

Perseteruan agama di Tanah Air makin hari makin memanas. Karenanya, masalah agama perlu perhatian serius.



Sumber: google.com

SEBAGAI negara majemuk dengan beragam Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik. Perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah kerap menjadi pemicu pecahnya bentrok antar mereka. Terlebih, masalah agama yang akhir-akhir ini semakin marak bak buah yang tengah panen. Sebut saja pembakaran rumah ibadah umat Nasrani di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atau pembakaran rumah ibadah umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua. Dua kasus ini hanya sebagian dari banyaknya kasus yang melibatkan agama di Indonesia.

Kala itu, cerita Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) Boas Tumangger, di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebuah rumah ibadah umat Nasrani dibakar oleh umat Islam pada 13 Oktober 2015 lantaran tak memiliki izin mendirikan bangunan. Pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB, warga berkumpul di Kecamatan Sim-

pang Kanan. Dua jam kemudian, kelompok tersebut bergerak ke Tugu Simpang Kanan. “Kira-kira mereka berjumlah seribu orang,” kata Boas dalam pesan singkatnya, Rabu (18/1/17).

Sesampainya di Tugu Simpang Kanan, umat Islam dihadang pasukan TNI dan Polri, sehingga mereka menuju Gereja Huria Kristen Indonesia (GHKI) Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meria. Setelah membakar gereja, massa bergerak ke Desa Suka Makmur. Di pertengahan jalan, massa dihadang umat Nasrani yg ada di kampung tersebut dan melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrok dan memakan korban.

Meski sudah menjadi kasus serius hingga memakan korban, menurut Boas, aparat setempat sama sekali tak menggubris para pelaku. “Aparat terkesan membiarkan pembakaran dan perkelahian tersebut terjadi,” kata Boas. Karena itu, lanjut Boast, hingga kini umat Nasrani di Aceh Singkil masih merasa waswas suatu saat

akan terulang kembali kejadian yang sama. Karena meski sudah terhitung dua tahun sejak terjadinya insiden pembakaran rumah ibadah umat Nasrani, belum ada penyelesaian sengketa.

Boas mengaku, ia dan kawan-kawan Nasrani berharap suasana menjadi kondusif. Mereka pun selalu mencoba mendekati umat Islam yang ada di sekitar secara persuasif sambil menunggu pemerintah membantu mediasi persoalan yang mereka hadapi. Namun, ketika salah satu umat Islam yang ikut serta membakar GHKI diminta keterangan, hingga berita ini diturunkan, ia tak juga merespons.

Sedangkan, rumah ibadah Umat Islam di Kabupaten Tolikara dibakar umat Kristen menjelang salat Idulfitri pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan salat Idulfitri yang diramaikan oleh *speaker*. Merasa terganggu dengan suara *speaker* yang dipasang di tengah lapan-

gan, umat Kristen pun mendatangi rumah ibadah umat Islam.

Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat Kristen meminta umat Islam untuk membubarkan kegiatan salat Idulfitri tersebut. Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Saat itulah umat Kristen melempari rumah ibadah umat Islam dengan api hingga terbakar. Umat Islam yang hendak salat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan.

Maraknya konflik agama di Indonesia turut menjadi perhatian Koordinator Bidang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jayadi Damanik. Ia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum konstitusi bukan hukum agama. “Kalau sudah wilayah negara, tapi memakai hukum agama, maka itu dinamakan pelanggaran HAM KBB,” ujar Jayadi, Senin (9/1/17).

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999, yakni *setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak atas KBB seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku*.

Harusnya, lanjut Jayadi, negara bertanggung jawab terkait adanya kasus kebebasan beragama. Aparat penegak hukum

“Apapun alasannya, orang tak bisa dibeda-bedakan,”

menjalankan kewenangannya, tapi jangan tajam ke minoritas tumpul ke mayoritas, itu diskriminasi. “Apapun alasannya, orang tak bisa dibeda-bedakan. Orang atau pihak yang mendiskriminasi orang lain dari segi apapun harus segera ditindaklanjuti,” kata Jayadi. Saat ini, negara terlalu sibuk dengan kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, tapi tidak mengurus bahwa ada pihak yang sedang melawan konstitusi.

Sebenarnya, sebagai bagian pemerintahan yang memayungi masalah agama, Kementerian Agama (Kemenag) sudah cukup melaksanakan tugasnya. Demikian dikatakan Ketua Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) Kemenag Feri Maldi.

Menurutnya, sebesar apapun peran dan upaya yang dilakukan pemerintah, tak akan berdampak apapun jika masyarakat tak ikut serta membantu. “Bantuan yang dilakukan masyarakat cukup dengan toleransi antar umat beragama. Itu saja cukup,” ujar Feri saat ditanya lewat telepon seluler, Jumat (20/1/17).

Peran Media

Kasus-kasus agama yang terjadi di Indonesia tentu tak

lepas dari pemberitaan media. Ketua Serikat Jurnalis Untuk Kebebasan (Sejuk), Ahmad Junaidi berpendapat, sebagai sumber informasi bagi masyarakat, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dikemas dalam sebuah berita. Baik tidaknya suatu berita tergantung dari masyarakat sebagai penerima informasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, masyarakat tidak bisa menerima sebuah berita secara mentah. Artinya, masyarakat masih perlu memilah kebenarannya.

Ahmad Junaidi juga menambahkan, media sangat turut andil terutama terkait kasus agama. “Kita boleh punya pandangan beda tapi ketika jadi wartawan harus meninggalkan latar belakang kita,” kata Junaidi, Senin (9/1/17).

Namun, sambung Junaidi, saat ini sebagian media malah jadi kompor. Harusnya, media bersikap independen tanpa memihak salah satu kubu.

Terkait dengan maraknya isu-isu yang berkembang melalui media sosial, Feri Maldi berharap pengurus FKUB tanggap terhadap informasi yang berkembang dan dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan gelisah.

Feri juga berpesan agar FKUB dapat membantu meminimalisir dan memfilter informasi-informasi yang berkembang lalu disampaikan apa yang sebenarnya terjadi. “Sehingga masyarakat tak mudah terpancing oleh informasi-informasi di media sosial yang sudah dimanfaatkan oleh segelintir oknum,” katanya, Jumat (13/1/17). Ke depan, Feri akan mengagendakan pertemuan dengan para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat.



Sumber: kapanlagi.com

POTRET KEKERASAN PEREMPUAN

Ika Puspitasari

Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ketahun. Beberapa di antaranya menyebabkan kematian.

PADA Selasa 10 Januari 2017 lalu, terjadi kasus kekerasan pada gadis kecil berumur 6 tahun, Kezia Mamasasa yang berasal dari Sorong, Papua. Sebelum meninggal serta ditenggelamkan dalam lumpur, gadis kecil ini diperkosa oleh tiga orang pelaku, Ronal, Lewi dan Nando.

Kekerasan itu tak hanya terjadi pada Kezia, tapi juga terjadi pada Eno Parinah yang berasal dari Serang, Banten 12 Mei 2016. Perempuan berumur 19 tahun itu diperkosa oleh tiga orang pelaku, yaitu Imam Pariadi (24), Rakhmat (20), dan pelajar Sekolah Menengah Pertama berinisial RA (15). Setelah itu, Eno dianiaya



sampai meninggal menggunakan gagang cangkul yang dimasukkan dalam kemaluannya.

Dua kasus di atas merupakan contoh kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Terhitung ada 119.107 kasus pada 2011, 216.156 kasus pada 2012, 279.688 kasus pada 2013, dan 293.220 kasus pada 2014.

Adanya peningkatan kekerasan pada perempuan setiap tahunnya dibenarkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (GK PKHN), Riri Khariroh. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan bagaikan puncak gunung es. Banyak perempuan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kasus kekerasan yang dialami, apalagi melaporkan kejadian pada badan

layanan untuk meminta pertolongan.

Keengganan korban melapor tindak kekerasan ini, sambung Riri, lebih banyak disebabkan oleh stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dianggap bersalah. "Kekerasan terhadap perempuan ada di berbagai kelas sosial, dari yang pelakunya orang biasa sampai pejabat sekalipun. Korban takut, kebanyakan yang lapor ke Komnas Perempuan merupakan korban yang sudah mengalami kekerasan parah," tutur Riri ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/1/17).

Riri menambahkan, Biasanya korban kekerasan pada perempuan disalahkan, bukan mendapat pertolongan ketika melapor ke polisi. Misalnya kasus pemerkosaan pada Yuyun asal Bengkulu, ada yang menyalahkan korban karena ia berjalan sendiri melewati tempat sepi ketika pulang sekolah.

Saat ini, Komnas Perempuan dan beberapa lembaga tengah memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Undang-Undang (UU) yang mengatur tindak pidana khusus. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan juga merumuskan jenis-jenis pidana sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. “Kami tengah berjuang agar RUU ini menjadi program prioritas,” ujar Riri.

Di sisi lain, salah satu aktivis perempuan dari Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin K. Susilo menyayangkan peran pemerintah yang kurang optimal dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penyelesaian kekerasan seksual dengan cara damai, terlebih jika pelaku merupakan kerabat dekat. Sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. “Adapun kasus dibawa ke proses hukum, pelaku tidak pernah dijatuhkan hukuman maksimal 15 tahun,” kata Zumrotin, (14/1/17).

Perihal dampak yang dialami korban, Zumrotin menjelaskan, dampak yang paling utama adalah trauma psikologis yang dapat membuat korban mengalami gangguan jiwa. Kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Sayangnya, kata Zumrotin, pemerintah kurang memberikan perhatian kepada korban.

Oleh sebab itu, lanjut Zumrotin, menurutnya perlu ada koordinasi antara Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Sosial. Alangkah baiknya, kedua kementerian ini mengevaluasi efektivitas program-program kerjanya dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Di samping itu, Kementerian Kesehatan harus siap melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dengan pemberian layanan aborsi aman pada korban kekerasan seksual atau pemerkosaan.

“Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dengan cara-cara yang sistematis, terukur untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. Pemberian hukuman maksimal perlu diterapkan untuk memberikan efek jera oleh pelaku dan rasa keadilan bagi korban,” tutur Zumrotin, (14/1/17).

Terkait kekerasan terhadap anak-anak, Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Adji Prasetya mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak sempat menurun saat ada wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Hukuman Kebiri, namun kasus kembali meningkat ketika Perppu itu belum disahkan. Berdasarkan data dari KPAI, dari 1 Januari 2011 sampai 25 April 2016 terhitung ada 1448 kasus kekerasan seksual pada anak.

Menanggapi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dikutip dari laman *Kompas.com* Menteri PPPA Yohana Yembise, meminta DPR RI untuk membahas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU

itu, Yohana juga meminta adanya pasal yang mengatur ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Media dalam Meliput Kekerasan Terhadap Perempuan

Menyoal media yang meliput kasus kekerasan terhadap perempuan, menurut Ketua Serikat Jurnalis Keberagaman Ahmad Junaidi, beberapa media tidak memperhatikan kondisi korban saat meliput korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan yang dapat dikatakan biasa. “Misalnya ada media yang meliput tentang korban pemerkosaan, dia mengatakan kata ‘untungnya’ pelaku mau menikahi korban, padahal itu tidak untung sama sekali,” kata Junaidi ketika di temui di Lantai 4 Gedung *The Jakarta Post*, Senin (9/1/17).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sebuah media meliput kasus kekerasan terhadap perempuan. Pertama, jangan sebutkan nama korban apabila korban masih hidup. Karena hal tersebut akan membuat korban semakin terpuruk dengan keadaannya. “Jangan kasih identitas yang detail tentang alamatnya,” ungapnya.

Dalam meliput korban kasus kekerasan seksual yang masih hidup, media harus selektif dalam pemilihan diksi yang digunakan dalam wawancara ataupun saat menulis berita. Hindari diksi-diksi yang membuat korban merasa dirinya ternodai. “Hindari kata diperkosa, digagahi, kita dapat menggantinya dengan mendapatkan kekerasan seksual misalnya,” pungkas Junaidi.

LAPORAN KHUSUS



ADVOKASI GANJA TAK TEMUI TITIK TERANG

Syah Rizal

Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Yayasan Sativa Nusantara (YSN) untuk melegalkan ganja memasuki babak baru. Setelah mengantongi izin riset dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kini dana jadi kendala.



Dok. Pribadi

2 Juli 2014 menjadi peristiwa penting bagi gerakan legalisasi ganja yang dimotori LGN. Bertempat di Gedung Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, LGN dan Kemenkes membahas peluang akan riset ganja medis dilaksanakan di bawah izin resmi Menteri Kesehatan.

Kala itu dari pihak Kemenkes menghadirkan Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Kasubdit Napza, Rokok dan Alkohol dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Sedangkan pihak LGN yang hadir adalah Ketua LGN, Dhira Narayana, Ketua Divisi Advokasi LGN Danto, dan Inang Winarso, salah satu pendiri LGN, serta Musri Musman seorang ahli kimia bahan alam dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Ada tiga agenda dalam kesempatan audiensi pertama, yakni pengenalan, pemaparan audiensi, dan diskusi untuk merespons apa yang disampaikan LGN. Setelah itu, Musri Musman menerangkan berbagai jurnal yang berisi hasil penelitian ilmiah terkait manfaat pohon ganja mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga bijinya untuk kepentingan medis.

Fokus LGN saat audiensi

tetap konsisten dengan Petisi Ganja Medis tahun 2013 silam yang mendorong Menteri Kesehatan segera mengeluarkan izin kepada lembaga swasta maupun negeri untuk melakukan riset tentang manfaat medis ganja.

Selang beberapa bulan, tepatnya 29 Agustus 2014, Kemenkes kembali bertemu dengan LGN. Fokus pembahasan audiensi kedua ini LGN mempresentasikan peta jalan atau langkah-langkah pemanfaatan ganja medis di Indonesia.

Musri yang mewakili LGN telah menganggap bila LGN telah memenuhi tahap konsultasi atau advokasi lantaran sejak tahun 2012 LGN sudah mengirim surat ke Menteri Kesehatan selaku penanggung jawab tertinggi dalam UU Narkotika.

Selain itu, LGN sebelumnya berkomunikasi pula dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) milik Kemenkes RI yang berada di bawah naungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Puslitbangkes), di Tawangmangu, Jawa Tengah pada awal tahun 2013.

Kunjungan LGN ke Tawangmangu dibenarkan Kepala

B2P2TOOT Lucie Widowati. Upaya kerjasama dari LGN sudah dimulai sejak tahun 2013. Lucie menjelaskan sehari setelah agenda “Seminar Pencerahan: Polemik Ganja dalam Undang-Undang Narkotika” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada Maret 2013. Lalu tanggal 28 Maret 2013, tim LGN mengunjungi B2P2TOOT Tawangmangu dengan maksud diskusi dengan Kepala B2P2TOOT untuk melakukan penelitian terhadap manfaat dan kegunaan medis pohon ganja.

Lucie mengungkapkan permintaan penelitian ganja di Balitbangkes, selanjutnya diajukan pada audiensi kedua. LGN mengajukan judul penelitian “Optimasi Kandidat Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Akar, Bunga dan Biji Cannabis”. Proposal diusulkan atas nama Dr. H. Musri Musman MSc. melalui YSN dan LGN. Awal tahun 2015, Kepala Balitbangkes pada saat itu Tjandra Yoga Aditama, menjawab permintaan LGN melalui surat izin, yang berisi beberapa pertimbangan yang perlu diikuti oleh LGN.

Direktur YSN sekaligus pendiri LGN Inang Winarso merasa izin yang diberikan Balitbangkes saat itu memberikan harapan untuk mewujudkan legalisasi ganja sebagai obat, khususnya obat diabetes. Inang bersama LGN terus mengadvokasi agar ganja yang sebelumnya termasuk narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mejadi narkotika golongan III.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Ta-

hun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ganja yang termasuk narkotika golongan I di mana dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi celah YSN dan LGN untuk melakukan riset ganja. Ketika hasil riset telah usai dan terbukti mampu menyembuhkan penyakit diabetes Inang pikir pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 supaya ganja menjadi narkotika golongan III.

Berbicara mengenai ganja yang masuk ke dalam narkotika golongan I, Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kombes Slamet Pribadi menegaskan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sudah melalui proses yang sangat panjang termasuk kajian akademis. Jadi, lanjut Slamet, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan bersama Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Polisi, BNN,

akademisi, dan lengkap dengan orang farmasi.

“Jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, menurut saya itu hal yang terlambat. Sebelum UU terbit, harus melalui proses legalisasi dan konsep dari kementerian dan uji publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Slamet, (20/1/17).

Selain telah mengantongi izin dari Balitbangkes, YSN berencana mengajak BNN karena pada waktu itu BNN meminta riset ganja medis juga diawasi tim riset dai BNN. Setelah itu, YSN bersama LGN menyurati BNN dengan tujuan agar tidak ada rasa curiga. Namun BNN tak ingin ikut campur untuk mengawasi riset karena ketika BNN memiliki kepentingan dengan lembaga yang melakukan penelitian. Nanti kewenangan negara akan bergantung dengan lembaga.

BNN sendiri tidak menolak jika semisal hasil riset ganja terbukti positif mengobati diabetes. Tapi Slamet tidak tahu-menahu ketika ganja legal menjadi obat bukan berarti tanaman ganja dilegalkan.

Sementara itu, untuk merealisasikan riset ganja, YSN membutuhkan uang Rp500 juta “Tapi untuk sekarang dana yang terkumpul bahkan belum menyentuh angka Rp100 juta. Apalagi pemerintah tidak ingin membantu lantaran keterbatasan dana,” keluh Inang saat ditemui di pusat perbelanjaan di bilangan Sudirman, Jakarta, Rabu (18/1/17).

Lucie menyangkal pernyataan Inang tentang pemerintah tak ingin membantu mewujudkan ganja sebagai medis. “Balitbangkes tidak tahu perkembangan riset tersebut dan Balitbangkes tidak ikut bertanggung jawab,” sahut Lucie.

Di Balik Pengilegalan Ganja

Perjuangan ganja tak terlepas dari *The United Nations Single Conventions on Narcotics Drugs* 30 Maret 1961. Sejak konvensi yang diadakan di New York, Amerika Serikat, kampanye untuk memusuhi ganja mulai marak. Ganja disimbolkan sebagai tanaman yang berbahaya dan mematikan.

Pengilegalan ganja di Indonesia dimulai saat Presiden Soeharto meratifikasi konvensi narkotika tahun 1976. Sejak diratifikasi, pada tahun yang sama, pemerintah memiliki UU Narkotika yang notabene mengikuti hasil konvensi tersebut.

Sejak adanya UU Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 pada pemerintahan Soeharto, ganja yang tumbuh sejak jutaan tahun lalu dicap sebagai tanaman berbahaya dan mematikan. Dan kini UU Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi turunan UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Ditambah, pengilegalan ganja pun diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111, pelanggaran akan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Karena itu, kini tanaman ganja menjadi sesuatu yang benar-benar tak dapat digunakan sebagai obat, sehingga masyarakat yang memanfaatkan ganja sebagai obat hanya dapat memakainya sembunyi-sembunyi.

LAPORAN KHUSUS

DUA MATA PISAU PERAN GANJA



Sumber: google.com

Yasir Arafat

Sejatinya ganja memiliki khasiat untuk menyembuhkan beragam penyakit. Namun, momok menakutkan tanaman ini masih menghantui masyarakat.

AWALNYA benjolan sebesar biji beras di sebelah kiri bagian tengah tulang belikatnya mulai terlihat, saat disentuh rasanya pun amat pedih. Pengguna yang enggan disebutkan namanya ini mulanya mengira benjolan tersebut sebatas luka memar semata. Hanya saja, lambat laun benjolan tersebut kian membesar hingga seukuran ibu jari orang dewasa. Rasa khawatir semakin menghinggapinya, akhirnya ia pun memutuskan melakukan operasi pada benjolan di balik kulitnya.

Sebulan setelah operasi, dokter meminta ia melakukan operasi kembali. Mendengar kabar tersebut, sentak ia bertanya-tanya, dokter menjelaskan hasil laboratorium menyatakan benjolan tersebut merupakan virus kanker kulit (Karsinoma). Pada operasi kedua ini, dokter berhasil mengangkat daging pipih selebar 1 cm dan panjang 6 cm. “Setelah itu saya dianjurkan melakukan penyinaran untuk membunuh sisa sel kanker yang masih aktif,” terangnya saat dihubungi *Institut*, Selasa, (17/1/17).

Bukannya membaik, selang tiga bulan berikutnya benjolan kecil justru timbul di area ketiak kirinya. “Pas *tau* ada benjolan lagi, dosis pemakaian propolis pun *ditingkatin*,” sambungnya. Walaupun begitu ia tak patah arang, melalui portal berita *online* ia mulai mencari tahu obat alami pembunuh sel kanker. Tak disangka, pada sebuah artikel ia menemukan hal baru.

Ganja yang selama ini ditekankan masyarakat nyatanya di luar negeri dimanfaatkan untuk menyembuhkan kanker, “Saya kaget! Enggak percaya, sekaligus senang,” cetusnya. Semenjak hari itu

ia mulai intens mengkaji ganja. Kajian yang dilakukannya membawa ia mencoba pengobatan alternatif memakai ganja.

Di satu sisi ia menyadari hal itu sangat beresiko, sebab Undang-Undang Dasar (UUD) no. 35 tahun 2009 menyatakan tanaman ganja merupakan jenis narkotika golongan I, yang artinya hanya boleh digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Lebih lagi bila saja pihak berwajib mengetahui metode pengobatannya ini, bukan tidak mungkin ia akan direhabilitasi.

“Ini memang berisiko, saya juga gak mau direhab ataupun ditahan. Terkadang saya takut, tapi rasa ingin sembuh membuat saya mengabaikannya,” ujar pria berusia 45 tahun ini. Biasanya ia meminum ekstrak ganja dua kali dalam sehari. Walhasil, hingga saat ini, ia merasa metabolisme dalam tubuhnya kian membaik dan seimbang serta benjolan di ketiak kirinya telah mengecil.

Di satu sisi, ia pun mengakui pengobatannya ini dilakukan secara tersembunyi bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. “Keluarga? Enggak tahu pengobatan dengan ganja,” imbuhnya. Kendati sudah merasakan manfaatnya, sampai sekarang ia tak berhenti mengedukasi diri dan berdiskusi bersama aktivis peduli ganja demi mengembangkan kegunaan ganja untuk kesehatan.

Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT), Lucie Widowati, manfaat kekayaan alam di Indonesia sangatlah besar hal itu dipercaya sudah terjadi secara turun menurun. Ia pun meyakini sebagian besar tanaman yang tumbuh di Tanah Air sangat mungkin di-

jadikan obat berbagai penyakit degeneratif.

Ihwal adanya kandungan positif dari ganja, Lucie memulai dengan menunjukkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/118/2015 tentang ijin memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman papaver, ganja, dan koka diberikan kepada B2P2OOT.

Lebih lanjut ia mengutarakan, pemanfaatan ganja untuk obat, belum dapat didukung Balitbangkes. Dikarenakan tanaman tersebut belum terbukti secara ilmiah melalui penelitian. Ia pun menjelaskan tanaman yang hendak diteliti harus melawati kajian mendalam demi menilai kemanfaatannya jauh lebih besar dibandingkan kerugian.

“Salah satu aspek yang dinilai adalah cara budidaya tanaman obatnya,” jelasnya, Minggu, (22/1/17). Lucie menambahkan, bila ingin membudidaya diperlukan aturan ketat agar nanti tak disalahgunakan. Ia juga merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membudidayakannya. Mengingat, lanjut ia, di Indonesia masih berlimpah tanaman yang dinilai mempunyai khasiat baik selain ganja. Dengan berbagai alasan tersebut, maka Balitbangkes belum merekomendasikan ganja untuk pengobatan.

Direktur Yayasan Sativa Nusantara (YSN), Inang Winarso mengungkapkan, upaya kerjasama YSN dengan Kemenkes sudah dimulai sejak tahun 2014. Kala itu Kemenkes melalui Balitbangkes merespons surat audiensi dari YSN. Audiensi pun berlangsung alot, tapi pada akhirnya Balitbangkes menyetujui YSN meneliti tanaman ganja dengan beberapa catatan.

Antara lain penelitian di-



Sumber: vocativ.com

awali dengan uji pra klinis hingga klinis, setiap penelitian wajib melibatkan dan menggunakan metode Balitbangkes, serta susunan peneliti berasal dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Walau dipercaya dapat mengobati beragam penyakit seperti Alzheimer, Arthritis, parkinson, hingga kanker. Namun, lanjut ia, pada penelitian kali ini, YSN akan memfokuskan untuk pengobatan diabetes.

Namun sayang, sampai saat ini Kemenkes melalui Balitbangkes belum juga berani meneliti ganja. Menurut Inang, mungkin saja hal itu dikarenakan ganja masuk ke dalam narkoba golongan I. Lebih lagi Badan Narkotika Nasional (BNN) pun terkesan pasif mendukung pene-

litian ini.

“Padahalkan udah sesuai prosedur, tapi kenapa tidak didukung?” keluhnya, Rabu (18/1/17). Kendati sudah melayangkan surat pengajuan pengawasan penelitian ganja ke BNN. Ia mengaku BNN tak pernah merespons positif surat tersebut. Ditambah lagi, Balitbangkes menyampaikan kalau pemerintah tidak memiliki dana untuk meneliti ganja.

Menanggapi demikian, Kepala Bagian (Kabag) Humas BNN, Slamet Pribadi mengatakan, persoalan regulasi tetap diatur Kemenkes, BNN sendiri hanya pelaksana tugas dan fungsinya tidak untuk mendampingi lembaga swasta melakukan penelitian. Di

sisi lain, Slamet pun mengamini bahwa semua narkotika mempunyai manfaat termasuk ganja. Hanya saja sisi positif tersebut tertutup dengan dampak buruk yang ditimbulkannya.

Terkhusus ganja, menurutnya manfaat yang nanti didapat tak jauh lebih baik dari obat yang saat ini legal di masyarakat. Kalau pun nantinya ganja dapat dijadikan obat, BNN tak memiliki wewenang untuk melegalkannya. “BNN berpedoman pada pemegang regulasi yakni Kemenkes dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Pokoknya, kalau ada yang salah *ngegunain* ganja langsung kita tangkap”, tutup pria kelahiran Jawa Timur ini, Jumat (20/1/17).



Sumber: Maulia/ANS

DARURAT HUTAN INDONESIA

Erika Hidayanti & M. Rizky Rakhmansyah

Setiap tahunnya Indonesia terus mengalami deforestasi. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan tropis luas yang menjadi ‘paru-paru’ bumi.

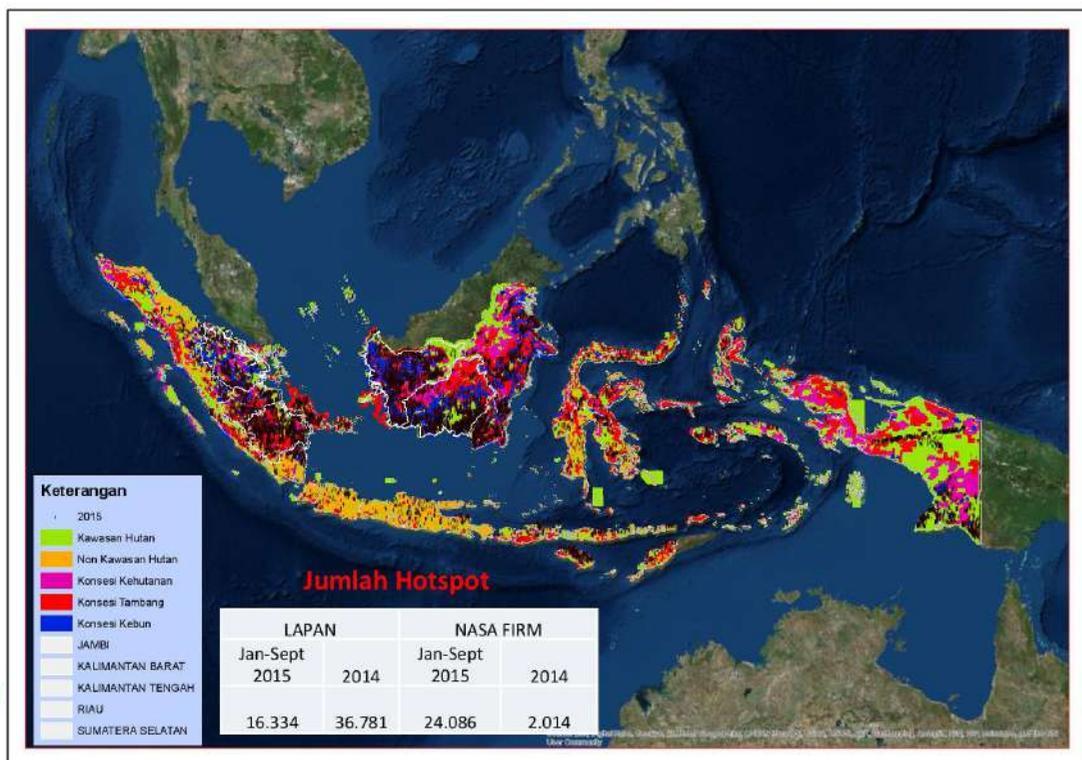
MENURUT laporan yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), sejak 2010 sampai 2015 Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan.

Bahkan, menurut World Wildlife Fund (WWF) dalam laporan berjudul *Living Forest Report, Saving Forests at Risk* pada periode 2010-2030 kalau tak ada upaya perbaikan tata kelola kehutanan, maka Sumatera, Kalimantan, dan Papua berpotensi mengalami deforestasi

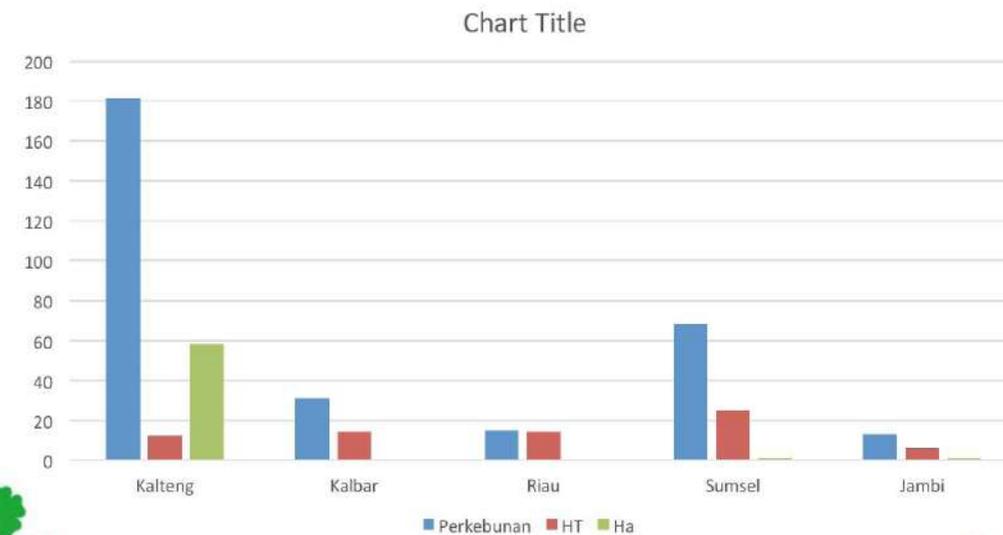
lebih dari 27 juta hektar. Faktor terbesar penggerak deforestasi di Indonesia, didominasi perkebunan skala besar dan infrastruktur.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat ada 450 konflik terkait lahan seluas 1.265.027 hektar pada 2016. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Urutan kedua sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti 104.379 hektar, migas 43.882 hektar, dan infrastruktur 35.824 hektar. Lalu pertambangan 27.393 hektar, pesisir 1.706 hektar, terakhir pertanian lima hektar.

Salah satu bentuk konflik itu adalah kebakaran hutan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kebakaran



Jumlah Perusahaan yang Mengalami Kebakaran 2015



hutan banyak terjadi di area konsesi yang artinya merupakan area yang telah dimiliki oleh berbagai perusahaan. Sebanyak 16.430 titik api di Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. berada di kawasan konsesi.

“Salah satu masalah hutan Indonesia itu adalah sudah bergesernya pengusahaan lahan dari pemerintah dan masyarakat pada korporasi-korporasi,” ujar Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Jumat (18/11/16). Ia juga memaparkan banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang membakar hutan untuk *land clearing* karena metode itu adalah yang paling murah.

“Peraturan di Indonesia juga

aneh, pemerintah itu kadang melarang masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hutan, tapi nyatanya korporasi-korporasi besar malah masuk ke kawasan tersebut,” papar perempuan yang akrab disapa Alin ini.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Hadi Daryanto menuturkan, deforestasi memang hal yang sulit untuk dihindari. Sampai saat ini pembukaan lahan secara ilegal oleh warga atau pun pengusaha masih menjadi masalah. Maka dari itu, pemerintah berusaha mengusung konsep kemitraan kehutanan. Melalui kemitraan kehutanan masyarakat dapat mengelola hutan adat. Menurutnya, 12,7 juta hektar lahan di Indonesia akan dialo-

kasikan untuk perhutanan sosial dengan skema hutan penanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan juga desa.

“Komposisinya kurang lebih akan menjadi 30 persen korporasi, 12 persen masyarakat, dan sisanya dimoratorium,” ucap Hadi, Senin (9/12/16). Terhitung hingga saat ini, terdapat 4700 lembaga yang mengelola hutan di Indonesia

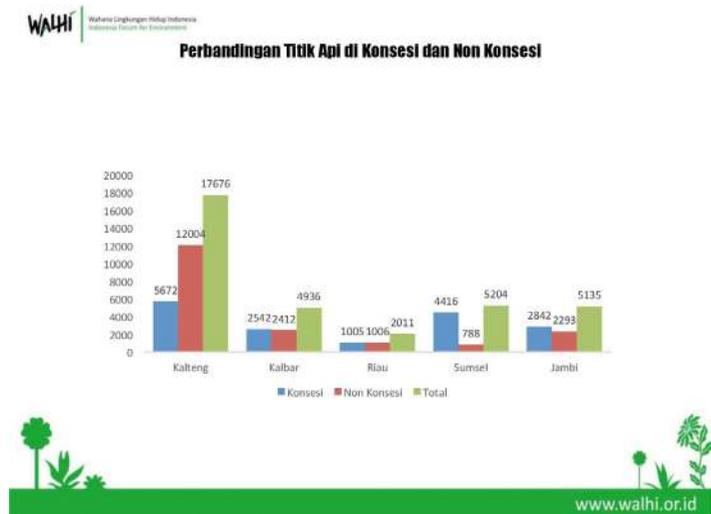
Selatan kemarin kawasan bekas kebakaran hutannya mengalami banjir,” paparnya.

Tak hanya itu, di berbagai kawasan hutan juga banyak terjadi konflik baik warga dan perusahaan maupun antar warga dan pemerintah. Hal ini biasanya dipicu karena perusahaan masuk ke dalam kawasan yang sudah lama dihuni warga.

“Pemerintah dalam menentukan pembagian kawasan hutan

tang Kehutanan Sosial” katanya.

Seperti konflik yang terjadi antara Suku Anak Dalam (SAD) dan PT Asiatic Persada (PT AP). Konflik ini bermula saat terbitnya izin konsesi perkebunan sawit kepada PT AP pada 11 Juli 1987. Pada saat itu, lahan milik SAD seluas 3.550 hektar. masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) milik PT AP. Padahal, lahan tersebut sudah SAD gunakan secara turun temurun.



Dampak

Kerusakan hutan telah menimbulkan berbagai bencana ekologis. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan November 2016 terdapat 2.171 jumlah kejadian bencana. Sebanyak 69% nya merupakan bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor.

“Bencana ekologis itu merupakan bencana yang bukan murni bencana alam tapi ada ulah manusia di dalamnya,” jelas Alin.

Alin memaparkan bencana-bencana tersebut merupakan dampak dari deforestasi yang terus menerus terjadi. “Contohnya saja di Sumatera

tak pernah melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah ratusan tahun tinggal di sana banyak yang tiba-tiba terusir,” papar Alin. Ia menambahkan ada 33 ribu desa di dalam dan sekitar hutan yang saat ini mengalami konflik di sektor kehutanan.

Menanggapi hal tersebut Hadi mengamini banyak warga yang diusir perusahaan lantaran telah membuka lahan di tempat masyarakat adat. Ia menuturkan, cara menyelesaikannya adalah dengan mengadakan mediasi antara pihak yang berselisih. “Itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 ten-

Untuk menyelesaikannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Namun, mediasi belum mencapai kesepakatan. Hingga akhirnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan SK Nomor 1373/020/III/2016 yang berisi tentang penyelesaian konflik agraria Suku Anak Dalam.

Walhi sendiri berharap agar ke depannya tata kelola hutan bisa menjadi lebih baik. Alin pun menyampaikan perlu adanya evaluasi izin yang sudah diterbitkan. “Izin tersebut harus diawasi, apakah masih sesuai atau tidak,” pungkasnya.



MENYOAL KEBEBASAN BERAGAMA



Sumber: shutterstock.com

Maraknya kekerasan atas nama agama di Indonesia membuat cemas. Bukan saja dalam negeri tapi juga di luar negeri. Semenjak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diadili dengan kasus penodaan agama, Indonesia masuk *headline* berbagai media internasional, New York Times sampai Al Jazeera. Saya diminta bicara dengan berbagai kedutaan asing. Mereka juga cemas lihat perkembangan apa yang disebut Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama sebagai peningkatan jumlah *Islam supremacist* di Indonesia.

Menurut Setara Institute, kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama, ada pada kisaran 100 sampai 200 setiap tahun, dari 91 kejadian pada 2007 sampai 264 pada 2012. Pada 2013 ada 230 kejadian dan 2014 ada 107. Korbannya, minoritas agama, terutama minoritas non-Muslim (termasuk Kristen dan Buddha), minoritas Muslim (termasuk Ahmadiyah dan Syiah) maupun minoritas agama lokal, misalnya, Sunda Wiwidan, Parmalim, Hayu Ningrat sebagainya. Pelakunya klaim mereka mewakili Islam Sunni. Khusus di beberapa daerah Indonesia timur, korbannya adalah minoritas Muslim, termasuk di Papua Barat dan Timor.

Seperti yang kita ketahui bersama, kekerasan atas nama agama biasanya terjadi karena ada faktor lain, seperti politik sampai ekonomi. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya dilakukan perbaikan lewat jalur politik. Menurut Human Rights Watch, salah satu sebab meningkatnya kekerasan atas nama agama adalah hukum yang diskriminatif di Indonesia.

Pada 2006, rezim Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan aturan soal “kerukunan beragama” dengan pendekatan mayoritas-minoritas. Yudhoyono juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di seluruh Indonesia dimana anggota-anggotanya harus mencerminkan proporsi agama di

masing-masing kabupaten dan kota (total masing-masing 17 orang) atau provinsi (total 21 orang). Mereka bertugas memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Di Jawa dan Sumatera, forum ini didominasi oleh warga beragama Islam. Di Bali, dominasi ada pada warga Hindu. Di Papua, Flores dan sebagainya, dominasi warga Kristen. Bila mereka tak mufakat dalam suatu permohonan rumah ibadah baru –dalam beberapa kasus bahkan renovasi rumah lama—mereka akan voting. Pihak minoritas sering kalah. Minoritas lantas pakai cara yang kurang pantas, dari suap sampai keras kepala bikin rumah ibadah. Buntutnya, kekerasan atas nama agama.

Pada Mei 1953, Presiden Sukarno pidato di Universitas Indonesia dimana dia mengingatkan agar negara Indonesia tak pakai mayoritas-minoritas dalam kebijakan soal agama. Sukarno bilang ia akan menciptakan ketidakadilan. Seharusnya semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban setara. Prinsip kesetaraan tersebut diubah pada 2006.

Pada 2009, Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan gugat pasal penodaan agama di Mahkamah Konstitusi. Mereka minta pasal dicabut dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia bertentangan dengan UUD 1945 soal “kebebasan beragama.” Mereka bilang pasal tersebut rentan dipakai kepentingan politik. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Wahid. Ia malah makin sering dipakai, ada 100 kasus lebih dengan tingkat vonis bersalah hampir 100 persen pada zaman Yudhoyono. Ia selalu dipakai dengan tekanan politik.

Di tengah-tengah kemajemukan Ras, Suku, Agama dan Antargolongan (SARA) Tanah Air, bagaimanapun Indonesia harus bebas dari intoleransi SARA. Tentu, yang terpenting kita harus tahu bagaimana mengembalikan diskriminasi-diskriminasi ke dalam kotak? Juga berbagai orang dan or-

ganisasi yang sudah terlanjur besar dalam memanfaatkan diskriminasi? Kalau saya jawab tidak, saya harus menerangkan bagaimana kekerasan atas nama agama dan etnik pasca-Suharto bisa menurun, mulai dari pembantaian etnik Madura di Kalimantan sampai kekerasan sektarian di Ambon dan Ternate, masing-masing makan korban 10,000 dan 15,000?

Jawabannya tentu tergantung bagaimana kita memilih politisi kita. Warga Indonesia harus gunakan hak pilih mereka dengan mencari informasi soal visi dan program para calon. Bila kita memilih politisi dengan mutu baik, tanpa pandangan agama, etnik, maupun gender, saya kira, Indonesia bisa berjalan pelan menuju masyarakat yang lebih maju.

Bicara penyelesaian, persoalan intoleransi dan kekerasan ini ibarat kotak Pandora sudah dibuka. Ketika Pandora dalam mitologi Yunani menutup kotak tersebut, semua kejahatan sudah keluar dan tersisa hanya harapan. Saya tak tahu apakah Pandora bisa memasukkan kembali barang-barang jahat yang sudah dibukanya di Indonesia. Saya harap semua aturan yang diskriminatif ditinjau ulang, dari soal “kerukunan beragama” sampai penodaan agama, dari kolom agama di KTP sampai peranan Majelis Ulama Indonesia dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Ia perlu dilihat kembali bagaimana aturan diskriminatif dan organisasi negara, maupun semi-negara, menggerogoti cita-cita negara dan bangsa Indonesia.

Dalam hal penyelesaian, peran pemerintah turut andil. Sayangnya, saya kira pemerintahan Joko Widodo belum berbuat maksimal. Pada 2016, mereka bikin aturan anti-Gafatar serta mengusir hampir 8,000 warga Gafatar dari Kalimantan. Persoalan ruwet dibikin tambah ruwet.



ANDREAS HARSONO*

*Penulis di Human Rights Watch sejak 2008-saat ini

POSISI MANUSIA DI ERA KNOWLEDGE SOCIETY

Berkat revolusi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dunia senantiasa mengalami perubahan pesat. Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa awalnya masyarakat hidup sederhana. Dengan menggunakan tenaga kasar dan peralatan sederhana, misalnya, masyarakat agraris hidup bercocok tanam. Revolusi industri di beberapa negara Eropa mengubah wajah dunia. Berbagai penemuannya dalam bidang teknologi mengubah peradaban manusia ke arah revolusi industri. Tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin dan aneka hasil teknologi industri lainnya.

Globalisasi mempercepat perubahan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan inovasi di bidang teknologi, komunikasi dan komputer dengan cepat mengubah masyarakat industri menjadi masyarakat ilmu (*knowledge based-society*). Era ini ditandai dengan semakin kuatnya posisi dan supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan unggul tidaknya sebuah masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi sangat vital perannya sebagai kekuatan penggerak ekonomi sebuah bangsa.

Karena itu, banyak negara berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan pendidikan terbaik. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan misalnya sangat percaya bahwa eksistensi sumber daya manusia yang berilmu dan penguasaan teknologi merupakan kunci utama untuk mendapatkan kemajuan, kesejahteraan ekonomi, dan keberhasilan dalam memenangi persaingan global. Sebaliknya, negara-negara yang terlalu berbangga diri dengan kepemilikan sumber daya alam namun tidak dibarengi dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tetap sulit bertransformasi menjadi negara yang maju dan kaya.

Kamu Dimana?

Namun demikian, meski menghadapi kenyataan



di atas, tidak semua kelompok masyarakat menyadari pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Sementara sebagian mau bersusah payah mengalokasikan tenaga, pikiran dan waktunya untuk mendalami, mempelajari ilmu pengetahuan. Namun, tak sedikit pula kelompok masyarakat yang tidak melakukan sesuatu apapun dalam konteks pengembangan ilmu, melainkan hanya bertopang dagu, pesimis, minder, dan tidak tahu harus melakukan tindakan apa.

Pada abad ilmu seperti sekarang ini, menurut Kemal Guruz (2008), masyarakat bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah "*knowledge producer*," yakni kelompok masyarakat yang menciptakan, mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan. Kelompok ini sangat kreatif dalam memprediksi masa depan, membaca situasi kini dan cerdas dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam rangka mempermudah aktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kelompok kedua adalah "*knowledge user*," yakni yang secara aktif menggunakan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan pihak lain. Dengan berbagai upaya inovasi dan pengembangan, kelompok masyarakat ini tidak hanya berhasil memanfaatkannya untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan kemajuan, tetapi juga berpotensi tumbuh menjadi kekuatan baru dalam pengembangan ilmu.

Ketiga adalah kelompok masyarakat yang hanya menjadi pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi secara pasif. Kelompok ini bisa jadi malas dan enggan belajar, sehingga berpotensi terasing, teralienasi, terputus dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Jadilah kelompok ini sebagai masyarakat yang "*technologically disconnected*."

Pertanyaan yang muncul adalah di antara ketiga kelompok dan lapisan masyarakat di atas, dimanakah posisi anda berada? Idealnya, mahasiswa itu empati kelompok yang pertama. Bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku dunia ekonomi,



YUSRAN RAZAK*

mahasiswa bersinergi menjadi agen yang memproduksi ilmu pengetahuan. Tak diragukan lagi bahwa mahasiswa adalah kelompok terdidik diharapkan memiliki sumber daya mumpuni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atau, setidaknya, mahasiswa ini diposisi kedua; yakni kelompok yang secara aktif menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat pengembangan kapasitas dirinya. Ia memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti google dan komputer untuk menyelami luasnya samudera ilmu.

Sebab, dengan satu *klik* saja, seseorang kini dengan mudahnya menghimpun jutaan informasi dalam sekejap. Ia juga memanfaatkannya untuk membangun, mengembangkan jejaring, pertemanan dengan mahasiswa/peneliti lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, media sosial, teknologi informasi serta komunikasi juga bisa dimanfaatkan untuk melipatgandakan pendapatan ekonomi.

Teralu memalukan jika ada seorang mahasiswa hanya berdiam diri di level ketiga; yakni menjadi pengguna teknologi yang pasif atau bahkan terasing dari kemajuan ilmu pengetahuan. Paling jauh, hanya bisa menggunakan mesin pencari dan sosial media untuk mengakses, menyebarkan informasi *hoax* (palsu), ataupun untuk mencari hiburan yang bukan saja tidak sehat, namun juga tidak bermutu dan berkualitas rendah.

*Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta

KASUS HAM

DI PERSIMPANGAN SEJARAH IDEOLOGI

Kamis 19 Januari lalu aksi Kamisan atau aksi Payung Hitam yang digelar untuk ke 477 kali telah genap 10 tahun. Namun dari 136 surat yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi, belum ada balasan satu pun.

Sejak 18 Januari 2007, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) konsisten menggelar aksi diam ini dengan tujuan, agar negara menyelesaikan kasus HAM dari 1965/1966 sampai yang paling tersohor kasus pembunuhan Munir. Alhasil aksi Kamisan mendapatkan rekor MURI, dengan Piagam bertuliskan “Pelaku Ungkap Rasa Setiap Hari Kamis Terlama (10 tahun dan masih berlanjut)”.

Aksi Kamisan adalah simbol perjuangan pencari keadilan dan kebenaran HAM. Sehingga arti Kamisan Payung Hitam memiliki arti yang paling substansial terhadap eksistensi manusia di dunia. Perjuangannya harus diteruskan sebagai (meminjam istilah Immanuel Kant) *Imperatif Kategoris* atau ‘kewajiban mutlak’ atau kemanusiaan dihadapan rezim yang absen humanitas.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti Pembantaian massal 1965-1970, Penembakan misterius “Petrus” 1982-1985, Kasus di Timor Timur pra Referendum 1974-1999, Kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989, Kasus-kasus di Papua 1966-2007, Kasus Marsinah 1995, Talangsari Lampung 1989, Penembakan mahasiswa Trisakti 1998, Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, dan Penculikan Aktivis 1998, seharusnya membuat negara berbenah diri.

Menurut KontraS, kasus pelanggaran HAM dibagi menjadi dua kriteria: pertama, yang belum tersentuh proses hukum; kedua, yang macet di Jaksa

Agung. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar kasus belum di tersentuh proses hukum.

Harapan masyarakat agar negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia nampaknya menemui jalan terjal. Piagam penghargaan rekor MURI pun, yang seharusnya menjadi lonceng peringatan agar negara segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM, tampaknya menjadi penghibur belaka.

Mengingat bahwa banyaknya pihak dari masyarakat dan elit politik nasional yang enggan menyelesaikan kasus ini, khususnya memakai legitimasi negara dalam menyelesaikan kasus yang tak berkesudahan ini.

Hal ini ditambah dengan pernyataan Wiranto—yang pada saat itu menjabat sebagai Menkopolkukam—untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari jalur non yudisial, dengan tujuan agar pihak terkait saling mendapatkan *win-win solution*.

Pernyataan sikap Wiranto (Menkopolkukam) setidaknya dapat ditafsirkan dalam dalam dua hal. Pertama, terdapat niat penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan tidak memakai legitimasi negara, atau dengan kata lain negara tidak ingin mengatakan “dengan ini negara minta maaf atas pelanggaran kasus pelanggaran HAM...”.

Kedua memang terdapat itikad baik dari negara agar pihak yang terkait kasus pelanggaran HAM mendapatkan solusi yang sama baiknya.

Sehingga mekanisme penyelesaian tidak menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Aktor dan korban dapat menyelesaikan hasil masalahnya secara *legowo*.

Indonesia saat ini

Sudah kurang lebih delapan belas tahun Indonesia telah meninggalkan era otoritarian (Orde Baru)

dan dua belas tahun sudah Indonesia telah masuk fase konsolidasi demokrasi. Buah perbaikan sistem politik ini adalah rilis Freedom House (2006), yang memasukan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat. Prestasi ini tentunya membanggakan.

Konsekuensi dari penguatan konsolidasi sistem ini adalah menguatnya peran *civil society* sebagai pilar arena yang dengan hak (kebebasannya) dan kewajibannya mengontrol negara, juga dijamin, oleh negara serta *rule of law* sebagai landasan konstitusional negara dan masyarakat (R. William Liddle Saiful Munjani, 2013.).

Namun prestasi-prestasi tersebut tidaklah berbanding lurus dengan upaya dan komitmen dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Fakta ini diperburuk dengan 10 Tahun Kamisan adalah momentum menagih janji kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla saat Pilpres 2014 yang pernah membuat komitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Baiknya pemerintah Indonesia belajar kepada negara Jerman Barat dalam menyelesaikan kasus genosida yang paling mengerikan di seluruh dunia: Pembantaian masal Yahudi. Pada 1963 Jerman telah melakukan persidangan (hukum) pertama bagi 19 mantan tentara SS yang bertugas di Auschwitz. Ini menjadi titik balik sejarah negara Jerman bahwa kehidupan adalah hak asasi tertinggi dari kesempurnaan. Hak untuk hidup adalah hal yang sangat tak ternilai.

Selain itu, dalam kasus pelanggaran HAM berat, terdapat fakta yang tak dapat disangkal bahwa, negara ini melakukan kejahatan HAM pada sekitar 1965-1966. Fakta ini merujuk kepada putusan final pengadilan International People’s Tribunal (IPT’65). Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Zak Yacoob. Patut ditegaskan peristiwa tersebut dikate-

gorikan sebagai kejahatan genosida.

Pengadilan di Jerman dan pengadilan IPT’65 seharusnya menjadi simtom bagi negara Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM—baik dalam tingkat ringan maupun berat.

Meskipun pemerintah mempunyai itikad baik dengan mengadakan rekonsiliasi korban konflik 1965. Akan tetapi hasil dari rekonsiliasi itu tidak mempunyai daya kejut yang kuat bagi harapan penyelesaian kasus HAM yang lainnya. Inilah yang cukup disayangkan pasca rekonsiliasi tersebut.

Pengadilan IPT’65 dan rekonsiliasi korban konflik 1965 dapat menjadi modal sejarah bangsa ini untuk lebih terbuka dan objektif terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Agar tidak ada pretensi untuk jastifikasi negatif terhadap orang-orang yang memperjuangkan isu HAM.

Dengan demikian pelajaran dari modal sejarah yang sudah kita punya harus dimaknai sebagai jalan emas menuju gerbang kemerdekaan diri (*self freedom*). Sehingga tidak ada satu dalil pun yang dapat diterima apabila berakibat bagi pemberangusan nilai-nilai kemanusiaan.

Bukan persoalan apabila pemerintah menempuh jalur non yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, karena rakyat Indonesialah yang kini menjadi korban dari sejarah masa lalu.

Sudah sepatutnya pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap penyelesaian kasus kemanusiaan, sehingga peristiwa pelanggaran HAM tidak boleh terjadi lagi. Serta kita tidak akan melihat Kamisan di tahun lainnya (dalam hitungan dekade).

***Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Presidium Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci)**



CENDHY VICKY VIGNANA*

PERSPEKTIF PERS MAHASISWA INDONESIA

Pasca reformasi '98, media tumbuh bak cendawan di musim hujan. Ribuan jenis media lahir menyongsong era kebebasan pers. Revolusi teknologi informasi pun turut mengamplifikasi gema sirkulasi informasi. Terjadi anomali.

Tesis Agus Sudibyo mengenai kebebasan pers pasca reformasi 1998 sebagai kebebasan semu, kian menemukan pembuktiannya pada kenyataan belakangan ini. Hal tersebut ia tuangkan dalam bukunya berjudul *Kebebasan Semu: Penjarahan Baru di Jagat Media*.

Keinginan mewujudkan media sebagai ruang publik yang bebas, bertanggungjawab dan demokratis, mengarah kepada jalan buntu. Alih-alih terwujud, media kembali menderita penyakit terbaru. Publik pun ikutan sakit dan menderita.

Dulu pers berfungsi sebagai alat perjuangan, penyampai aspirasi rakyat, dan kritik sosial. Regulasi dan praktik belakangan lebih mencerminkan ambisi penggunaan media untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi, bukan untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat.

Kebebasan pers di era demokrasi ternyata malah memberi manfaat terbesar bagi pihak para pemodal, yang tadinya tidak ikut serta dalam perjuangan demokrasi. Pers di tangan para pemodal ternyata lebih jahat, lebih merusak dari pers yang dikekang para penguasa politik, rezim otoriter dan kolonialis.

Di tengah kondisi tersebut, berkat revolusi teknologi informasi, kemampuan publik menyuarakan aspirasi dengan menciptakan media alternatif, tiada syak, kian menambah suasana runyam. Gaduh. Media konvensional memang telah mengalami deligitimasi. Akan tetapi tsunami informasi juga hadir bersama daya destruktif yang tak dapat diprediksi.

Kenapa Harus Persma?

Sebagaimana tertulis dalam sejarah Indonesia, kaum muda kerap mengalami keterlibatan yang signifikan dalam perubahan sosial. Di tengah situasi dan kondisi carut marut media pada taraf nasional, agaknya pers mahasiswa menemukan momentum untuk meredefinisikan eksistensinya.

Peran dan andil pemuda pada rangkaian peristiwa besar di Indonesia sangatlah monumental. Beberapa



pa peristiwa yang dimaksud di antaranya: 1908 tahun Kebangkitan Nasional, 1928 tahun kelahiran Sumpah Pemuda, 1945 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, 1966 pada masa kebangkitan Orde Baru, dan 1998 runtuhnya rezim Orde Baru atau Reformasi.

Didin S. Damanhuri dalam bukunya *Menerobos Krisis: Renungan Masalah Kemahasiswaan, Intelektual dan Perguruan Tinggi*, menuliskan ciri mahasiswa, yang pada gilirannya ciri tersebut sangat berpotensi dalam mewujudkan perubahan.

Pertama, mahasiswa adalah kelompok orang muda. Kelompok ini diandaikan sebagai entitas publik yang senantiasa tak puas terhadap lingkungannya sehingga merindukan perubahan secara dinamis dan radikal. Karena gerakannya kerap menunjukkan penentangan terhadap norma dan keadaan yang mapan dan mandeg (*status quo*).

Kedua, nafas dan aktivitas mereka senantiasa dilambiri sikap akademis. Sehingga sikap objektif-rasional dan kritis-skeptis akan sangat mempengaruhi cara pandang mereka dalam melihat setiap masalah. *Ketiga*, punya kecenderungan 'independen', dalam artian tidak terikat ketat secara finansial, birokratis dan ideologis. Ciri ini mengandaikan semata pada masa depan yang cerahlah, upaya mereka tertuju.

Dan *keempat*, mahasiswa merupakan subsistem masyarakat yang merangkum sekaligus latar be-

lakang lokal-regional, nasional dan mondial. Posisi semacam ini memungkinkan mahasiswa menatap konstelasi yang berkembang di tengah masyarakat secara komprehensif. Sehingga tidak mengulang pandangan kelompok lainnya, melainkan merumuskan dengan seksama pandangan yang holistik guna menyongsong perbaikan.

Bila mempertimbangkan empat ciri yang melamburi etos hidup dalam dunia idealisme mahasiswa, maka dengan sendirinya ciri-ciri ini pun akan pula dimiliki oleh pers mahasiswa. Itulah sebabnya pers mahasiswa senantiasa menjadi media alternatif pada segala zamannya.

Dalam melangkah, pers mahasiswa tentu tidak luput dari pelbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah dana dan kapasitas pengelolaan yang tidak seprofesional industri media. Dwi-fungsi sebagai aktifis pers sekaligus mahasiswa juga merupakan momok tersendiri.

Selain itu, faktor kesementaraan. Sebagai mahasiswa dan penuntut ilmu, masa menjadi mahasiswa relatif amat singkat. Sehingga sering kali suatu penerbitan mahasiswa berganti-ganti pengurus. yang pada gilirannya mengakibatkan warna dan misi terputus-putus. Oleh karena itu, perlu kiranya pers mahasiswa dalam suatu generasi atawa periode, merumuskan skala prioritas. Pers mahasiswa harus menghadirkan isu strategis berskala nasional, tidak terjebak pada isu lokal jangka pendek.

Beberapa Perspektif

Dalam menghadapi gelombang badai informasi yang kian memuakkan, pers mahasiswa kiranya hadir sebagai pembeda. Tidak ikut larut dalam arus pemberitaan populer-banal, semata mengejar peringkat, apalagi menjadi bagian dari pertarungan kepentingan elite politik.

Dalam hal ini beberapa perspektif yang mungkin layak dipertimbangkan sebagai titik tuju pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai agen rekonsiliasi, agen rasionalisasi, agen introspeksi.

Perspektif agen rekonsiliasi mengambil bentuk sebagai juru damai atas ihwal konfliktual yang berpotensi memporakporandakan bangsa-negara Indonesia. Mekanisme perspektif ini bekerja dalam rangka

membasmi dendam kesumat sesama anak bangsa, baik yang sengaja berlarut-larut dibiarkan ataupun konflik baru yang potensial tercipta. Misalnya, stigmatisasi terhadap PKI, konflik internal Sunni-Syiah, dan isu-isu SARA lainnya yang berfu

Iktikad mulia ini sejatinya sudah pernah diupayakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Barat, 2015 silam. Sebuah Majalah Lentera nomor 03/2015, dengan headline "Salatiga Kota Merah" ditarik kembali dari peredaran karena ditentang oleh pihak Polisi, TNI dan Pejabat Kampus. Pasalnya, Persma Lentera mendedah Peristiwa PKI 50 tahun silam di Salatiga. Sebagaimana galib diketahui, peristiwa PKI adalah luka lama yang tak kunjung (di)sembuh(kan).

Perspektif agen rasionalisasi berfungsi merawat akal sehat publik. Fungsi ini sangat penting karena publik belakangan ini menunjukkan gejala irasionalitas, terutama kalangan penganut agama. Perspektif ini pada gilirannya, salah satunya, akan berhadapan dengan eksekusi ajaran agama yang belakangan ini kian menunjukkan gejala revivalistik. Gejala keagamaan ini pada tataran praktis telah melahirkan insan ahistoris, demagog, dan delusif yang bermimpi mewujudkan negara teokrasi-otoritarian.

Terakhir, perspektif agen introspeksi, yakni sebagai otokritik terhadap media. Sebagai media yang lebih 'independen'--dengan segala kelemahan dan kekurangannya--pers mahasiswa sangat potensial menjadi semacam *watchdog* bagi media-media besar yang telah terlumuri kepentingan pemilik modal. Pers mahasiswa diandaikan sebagai antitesis media konvensional. Pers mahasiswa dalam hal ini dapat mengupayakan pembongkaran terhadap framing media besar yang dinilai merugikan publik.

Perspektif di atas tentu saja bersifat subjektif. Namun pers mahasiswa sebagai agen perubahan adalah kepastian objektif. Jika keberadaan pers mahasiswa sama sekali tidak membawa angin perubahan kepada arah yang lebih baik bagi publik, maka sebaiknya frasa 'pers mahasiswa' diganti menjadi 'pers taman kanak-kanak'!

*Pemimpin Redaksi LPM Institut
Periode 2013



RAHMAT KAMARUDDIN*

HUKUM

MENIMBANG PERPPU HUKUMAN KEBIRI

Arini Nurfadilah

Pelaksanaan kebijakan hukuman kebiri masih menjadi kendala. Eksekutor bagi pelaku kebiri memicu ketidakstabilan penetapan hukuman kebiri.



SETELAH mengalami perdebatan panjang tentang hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelecehan seksual, akhirnya masyarakat Indonesia boleh lega karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini muncul menyusul sejumlah kasus tindakan kejahatan seksual terhadap anak-anak beberapa tahun terakhir.

Sesuai data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Anak Berhadapan Hukum (ABH), baik anak sebagai korban kejahatan seksual, maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual, sejak 1 Januari 2011 berjumlah 339. Kemudian, meningkat pada 2012 hingga 736.

Pada 2013, berjumlah 590, dan mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 1217 pada 2014. Tercatat 375 kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak pada 2015, dan 60 kasus hingga 25 April 2016.

Tepat pada akhir Mei lalu, Presiden Jokowi mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini diterapkan karena meningkatnya kejahatan seksual pada anak dengan jumlah yang sangat signifikan. Dalam perppu ini, presiden memutuskan bahwa pelaku kejahatan seksual akan dipenjara dengan tambahan kebiri kimiawi.

Seperti tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri—disebut juga pengebirian atau kastrasi—adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis

pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Keputusan pemerintah untuk memberikan sanksi hukuman kebiri kimia dan alat deteksi elektronik ternyata menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Keseriusan Presiden Jokowi berupa penandatanganan Perppu Hukuman Kebiri menjadi ancaman serius pada oknum yang memiliki keinginan melakukan aksi kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, isi Perppu Hukuman Kebiri ternyata masih belum lengkap membahas mengenai hukuman pelaku pelecehan seksual, seperti dalam pasal 82 yang menyebutkan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Demikian pula yang dikatakan Kepala Sekretariat KPAI Retno Adji Presetiaju. Ia menjelaskan, hukuman kebiri hanya berlaku bagi pelaku dewasa yang sudah melakukan kejahatan seksual pada anak lebih dari satu kali dan lebih dari satu korban. “Kalau anak yang melakukan, maka bisa dilakukan *restorative justice* (secara kekeluargaan), anak tak bisa dikenai hukuman kebiri, karena meski ia pelaku, ia tetap dianggap korban,” Jumat (6/1/17).

Retno menambahkan, hingga kini, hukuman kebiri masih diperdebatkan, meski sudah masuk dalam undang-undang, pelaksanaannya akan sulit diimplementasikan. Terlebih, belum ada pihak yang bersedia menjadi eksekutor kebiri.

Dengan kata lain, hukuman tambahan seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi hanya berlaku bagi pelaku pelecehan seksual dewasa, tak bisa digene-

ralisir bagi semua pelaku pelecehan seksual. Padahal, tidak sedikit pelaku pelecehan seksual di bawah umur.

Sementara, bagi pelaku pelecehan seksual yang masih di bawah umur dapat dilakukan dengan pendekatan pemulihan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* seperti yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Restorative justice* ketika ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka pada hakikatnya didekati sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan malah dijauhi atau ditindak secara normatif.

Kemudian, Perppu ini hanya berlaku bagi korban pelecehan seksual di bawah umur atau masih dikategorikan anak. Lantas, bagaimana nasib korban pelecehan seksual yang sudah tidak masuk kategori anak-anak?

Agaknya, publik perlu kembali diingatkan dengan kasus gadis 14 tahun asal Bengkulu bernama Yuyun, yang diperkosa beramai-ramai oleh 14 orang remaja. Mungkin, tidak ada lagi kata atau bahkan kalimat yang dapat menggambarkan kegetiran yang diderita Yuyun. Kasus pemerkosaan secara kolektif tersebut tak hanya melibatkan laki-laki dewasa, bahkan beberapa dari pelaku tergolong anak-anak.

Kasus di atas harusnya dapat menjadi pertimbangan presiden agar tindak pidana tambahan perlu dijatuhkan pada semua pelaku pelecehan seksual tanpa batasan usia. Pada intinya, hukuman tambahan pelaku pelecehan seksual—salah satunya kebiri—tak berlaku bagi beberapa pelaku pelecehan pada Yuyun. Padahal, mereka tetap berstatus sebagai pelaku pelecehan seksual.

Bicara pelecehan seksual pun



Sumber: tempo.co

masih beragam. Beberapa kalangan masyarakat bahkan mendefinisikan perkataan ‘cabul’ pun masuk dalam pelecehan seksual. Apakah perppu yang baru hangat disahkan pemerintah juga berlaku bagi pelaku pelecehan seksual dalam kategori perkataan?

Simpang siurnya Perppu Hukuman Kebiri pun diamini Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprapta. “Masih belum jelas hukuman perppu berlaku untuk siapa,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksamana Bonaprapta lewat surat elektroniknya, Sabtu (7/10/16).

Aturan baru mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual semakin panas dengan ketidaksiapan para dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri lantaran bertentangan dengan sumpah jabatan untuk tidak menyakiti siapapun.

Seperti dikutip www.nasional.kompas.com, Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menegaskan, Ikatan Dokter Indonesia mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman

“Namun, eksekusi penyuntikan janganlah seorang dokter,”

seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual pada anak. “Kami tidak menentang perppu mengenai tambahan hukuman kebiri. Namun, eksekusi penyuntikan janganlah seorang dokter,” ujar Marsis dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/6/16).

Hukuman Kebiri, Efektifkah?

Beberapa pihak masih meragukan keefektifan hukuman kebiri dengan alasan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengundang perdebatan karena kejahatan seksual dianggap bukan semata-mata faktor libido manusia.

Keefektifan hukuman kebiri

pun turut menuai keraguan Pakar Hukum Pidana UI Gandjar Laksamana Bonaprapta. Ia menilai, bentuk nyata suatu aturan perundang-undangan terletak pada aplikasinya.

Gandjar menjelaskan, kepekaan pihak jaksa dan kemudian hakim seharusnya lebih menjadi fokus. Dia kemudian mengkritik isi perppu tersebut. Menurutnya, hanya Indonesia yang memiliki ancaman hukuman pidana minimal 10 tahun penjara.

Menurut Gandjar, semestinya pemerintah juga meningkatkan upaya pencegahan kejahatan terhadap anak secara terstruktur dan sistematis. Misalnya dengan memperkuat program-program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sehingga, kementerian tersebut dapat lebih aktif melakukan preventif hingga ke semua Rukun Tangga/Rukun Warga di Tanah Air. Selain itu, penegak hukum juga mesti ditingkatkan kepekaannya dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak. Korban harus didampingi psikolog setiap kali pemeriksaan berlangsung di kepolisian.

TABULASI DATA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TAHUN 2011 - 2016

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN						JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	339	736	590	1217	375	80	3337
	ABH Sebagai Pelaku							
	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	123	324	247	561	157	36	
	ABH Sebagai Korban							
	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	216	412	343	656	218	44	
2	Trafficking dan Eksploitasi	75	64	111	129	189	41	609
	Anak Sebagai Korban Prostitusi Online	16	27	60	83	117	27	
	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	14	
TOTAL								3946
Update Data : 01 Januari 2011 - 25 April 2016								

Sumber: KPAI

Countries and territories showing historical time-line of Zika virus spread (1947 - 2016)



TEROR ZIKA

Erika Hidayanti

Dua tahun belakangan, virus zika menjadi bahan perbincangan hangat di dunia kesehatan. Bahkan, WHO pun menetapkan status waspada untuk virus ini.

VIRUS Zika merupakan jenis flavivirus yang masih satu keluarga dengan virus penyebab demam berdarah yakni dengue. Perantara penyebarannya pun persis serupa yaitu melalui nyamuk *Aedes* terutama pada spesies *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Dalam kehidupan sehari-hari nyamuk jenis ini banyak berkembang biak pada genangan air bersih di sekitar rumah.

Mulanya virus ini ditemukan

di Hutan Zika, Uganda pada tahun 1947. Kala itu virus zika ditemukan dalam tubuh seekor monyet saat dilakukan surveilans demam kuning. Dirilis World Health Organization (WHO) virus ini menjangkiti manusia untuk pertama kali pada tahun 1952 di Uganda dan Republik Tanzania.

Kemudian Zika terus menyebar dari tahun 1960 sampai tahun 1980-an di kawasan Afrika dan Asia. Beberapa negara anggota ASEAN pun ikut melaporkan,

Filipina menjadi negara asia pertama yang terserang virus zika pada tahun 1953 dengan 19 positif dari 153 pasien demam. Di tahun yang sama, Malaysia dan Singapura pun mengalami kejadian serupa, tercatat 75 positif dari 100 penderita demam.

Dunia mencatat, wabah besar pertama akibat infeksi zika terjadi di Pulau Yap (Negara Federasi Mikronesia) pada tahun 2007. Berlanjut pada Juli 2015 Brazil mengungkapkan bahwa terdapat

hubungan antara infeksi virus zika dengan kasus sindrom *Guillain Barré*. Lalu, pada Oktober di tahun yang sama Brazil kembali melaporkan adanya hubungan infeksi virus zika dengan kasus mikrosefali pada bayi.

Tak cukup sampai di situ, berita tentang virus ini kembali beredar di kawasan ASEAN setelah dikabarkan 82 warga Singapura terjangkit virus zika pada Agustus 2016 lalu. Menyikapi tersebarnya virus zika di kawasan ASEAN, Menteri Kesehatan Indonesia, Nila F. Moeloek mengatakan, Indonesia pun telah terjangkit virus zika, korban pertama virus zika terdeteksi di daerah Jambi. Penderita zika tersebut berasal dari suku Anak Dalam. Laporan ini diterima Nila dari tim Eijkman dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Amerika Serikat (AS) yang melaporkan adanya virus zika di antara penderita yang diduga Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2015 di Jambi.

"Kebetulan. Jadi waktu itu melakukan penelitian untuk demam yang disebabkan oleh dengue. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ada warga yang positif terinfeksi virus zika," kata Nila (30/8/2016) dilansir dari tempo.co.

Namun ternyata, Jambi, bukanlah tempat pertama adanya zika di Indonesia. Sebelumnya pada 2012 tim dari Australia berhasil mengisolasi virus zika pada seorang turis wanita berusia 52 tahun. Ia menderita demam dan ruam kulit pasca mengunjungi Indonesia.

Di sisi lain hasil riset tim Naval Medical Research Unit Two (Namru-2) dan Universitas Gajah Mada (UGM) di Klaten, Jawa

Tengah menunjukkan fakta lain. Kala itu, spesimen yang diambil dari pasien demam di Rumah Sakit Klaten, Jawa Tengah, tahun 1977-1978 beberapa di antaranya positif virus zika dengan rentang dari 3,2 persen sampai 7,8 persen dari setiap kelompok penderita demam.

Chairul Anwar Nidom dari Avian Influenza Research Centre (AIRC) mengatakan, berita tentang virus zika menjadi momok terlebih bila dihubungkan dengan meningkatnya kasus mikrosefali. Mikrosefali sendiri merupakan suatu kondisi seorang bayi yang lahir dengan kepala kecil yang disebabkan otak mereka tidak berkembang sepenuhnya dalam kandungan.

Tingkat kerusakannya beragam, yang terburuk penderita mikrosefali dapat mengalami kematian apabila otak bayi tersebut sangat tidak berkembang dan tidak mampu mengatur fungsi-fungsi vital di dalam tubuh. "Selama 20 tahun zika ini tidak menjadi bahan pembicaraan, namun, ketika muncul dugaan adanya hubungan dengan kasus mikrosefali, ini yang menjadi ngeri," paparnya, Rabu (9/11/16).

Nidom menambahkan, sebenarnya hubungan antara virus zika dan kejadian mikrosefali belum terbukti secara ilmiah. Meski begitu, masyarakat harus tetap waspada namun tak perlu takut secara berlebihan. "Kebetulan saja di Brazil virus zika ditemukan pada kawasan yang juga kasus mikrosefalinya tinggi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan dosen Epidemiologi, Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Hoiron Nisa. Ia mengungkapkan, ibu hamil yang terinfeksi virus zika dapat menuarkannya ke dalam janin. "Meski

belum ada penelitian yang jelas membuktikan hubungan antara mikrosefali dan virus zika. Kemungkinan janinnya mengalami mikrosefali," paparnya, Rabu (9/11/16).

WHO pun membenarkan adanya konsesus ilmiah bahwa zika dapat menyebabkan cacat lahir bawaan pada bayi. Kondisi tersebut ditandai dengan lingk kepala yang kecil dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lebih jauh, institusi kesehatan dunia ini mengungkapkan, zika juga bisa menimbulkan Sindrom *Guillain Barre*, sebuah gangguan neurologis langka berujung kecacatan. Hanya saja, bukti konklusif antara Zika dengan mikrosefali baru belum dapat dipastikan.

Meski begitu kekhawatiran akibat virus ini terus menghantui masyarakat dunia. Sebab Zika dapat dengan mudah tersebar luas, hal itu dikarenakan gampangnya manusia berpindah tempat bahkan negara hanya dalam hitungan jam. "Beberapa negara juga sudah mengeluarkan *travel warning* untuk warganya yang akan bepergian ke daerah endemis zika," jelas Hoiron Nisa.

Nidom juga menjelaskan, virus yang dideteksi pada salah satu warga Suku Anak Dalam di Jambi merupakan virus jenis Afrika. "Bagaimana bisa virus dari Afrika ada di Jambi? Lalu virus di Brazil itu ternyata jenis Asia, padahal secara geografis Brazil lebih dekat dengan Afrika," paparnya.

Pencegahan Virus Zika

Pada dasarnya pencegahan virus zika sama seperti pencegahan dengue, sebab keduanya ditularkan oleh vektor yang sama. Kebersihan tempat tinggal dan lingkungan menjadi kunci ut-

ma mencegah berkembangbiaknya nyamuk Aedes. Salah satu dewan pakar Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI), Zulazmi Mamdy mengatakan, pengendalian vektor virus zika sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran flavivirus ini.

Ia pun menyarankan cara terbaik untuk mengendalikan vektor ialah dengan mengendalikan lingkungan tempat berkembangbiaknya. Lebih lanjut, Zulazmi juga menjelaskan, agar pengendaliannya dapat dengan mudah dilakukan maka dibutuhkan pula regulasi pendukung. “Untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung vektor tentu diperlukan peran masyarakat dan pemerintah,” ungkapnya.

Bukan hanya pengendalian vektor ternyata Indonesia telah memiliki vaksin untuk virus zika. Vaksin ini ditemukan dan dikembangkan oleh Nidom dan AIRC. Ia pun meyakini bahwa dalam waktu enam bulan dengan kerjasama dari industri vaksin dan

“Untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung vektor tentu diperlukan peran masyarakat dan pemerintah,”

pemerintah Indonesia— maka peneliti dari AIRC dapat menyempurnakan vaksin Zika yang siap diaplikasikan ke manusia.

Nidom menyatakan para peneliti di AIRC dapat melakukannya dengan cepat melalui sejumlah teknologi, termasuk teknologi *reverse genetics* yaitu mengubah virus di alam dengan mutasi gen menjadi virus yang dikehendaki. Teknik ini, kata Nidom, telah biasa digunakan kepada virus influenza dan beberapa virus lain.

Teknologi lainnya ialah *knock-out* flu virus, yaitu mengambil fragmen DNA dari virus influenza lalu menggantinya dengan fragmen dari virus target vaksin. Dengan kedua metode tersebut, peneliti di AIRC tidak membutuhkan virus utuh sebagaimana peneliti AS.

“Jadi konsepnya itu yang pertama secara mudahnya seperti mengganti bagian dari mobil atau mesin,” tutur Nidom. Namun, hingga saat ini pengembangan secara resmi dari pemerintah terkait vaksin ini belum ada.



Sumber: cnn.com



Dok. Pribadi

Yasir Arafat

Sudah menjadi kewajiban manusia agar selalu bersahabat dan menjaga keasrian alam. Mangrove penjaga pesisir laut sejuta manfaat.

MEMILIKI wilayah kepulauan terbesar di dunia, membuat tanah air beta ini dikenal dengan sebutan negara seribu pulau. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga merupakan satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Mengingat peranan mangrove yang penting bagi kehidupan masyarakat. Sudah barang tentu banyak manfaatnya yang bisa dipetik dari keberadaan mangrove.

Namun sayang, seiring perkembangan dan modernitas zaman masyarakat khususnya di perkotaan tidak lagi peduli mengenai kegunaan mangrove dan cenderung merusak ekosistem alam. Melihat demikian, mendorong beberapa mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro (UNDIP) bergerak melestarikan mangrove, dengan digerakkan Aris Priyono 7 tahun silam mereka berhasil mendirikan Komunitas KESEMAT Mangrove Volunteer (Kemangteer).

“Kami mewadahi masyarakat yang ingin berkontribusi melestarikan mangrove,” cetus Sekretaris Jendral Kemangteer Indonesia, Rizka Ayu Fardani, (5/10/16). Dalam wawancara ia berkisah, awal mula Kemangteer berasal dari KESEMAT—salah satu organisasi pelindung hutan mangrove— anggotanya pun hanya mahasiswa FPIK UNDIP. Lambat laun, melihat animo masyarakat melestarikan mangrove kian meningkat. Walhasil pada 6 November 2009, berdirilah

Kemangteer dan terbuka untuk umum.

Terlebih setelah berafiliasi dengan Kesemat, tambah ia, sejak 17 November 2014 manajemen Kemangteer termasuk dalam pengelolaan oleh Yayasan Inspirasi Keluarga Kesemat (IKAMAT). Perempuan yang akrab disapa Kika ini mengatakan, sekarang ini Kemangteer sudah tersebar ke dalam 9 regional di Indonesia antara lain, yakni Jakarta, Semarang, Malang, Jogja, Serang, Tangerang, Langsa, Medan, Karawang, hingga Papua.

Biasanya ragam kegiatan dilakukan Kemangteer, ia menambahkan, seperti mengadakan pertemuan tiap sebulan sekali, penanaman mangrove, nonton bareng film pelestarian

lingkungan hidup, bersepeda santai ke kawasan mangrove. Menurutnya semua kegiatan dalam komunitas ini guna mempererat tali persaudaraan antar anggota dan pengampanyekan manfaat mangrove. Bukan cuma itu, adanya perwakilan pada tiap regional memudahkan Kemangteer mengetahui problema kehidupan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Ia menambahkan, untuk jadwal kegiatan tiap regional memiliki waktu yang berbeda. Selain tatap muka, komunikasi antar anggota dilakukan melalui media sosial. Kini, tambah Kika, bila dihitung dari awal berdiri, tercatat sudah ada seratus lebih anggota Kemangteer yang tersebar di seluruh Indonesia. "Anggota kami beragam mas, tidak dibatasi umur dan latar belakang, asalkan komitmen mengkampanyekan mangrove ke seluruh lapisan masyarakat siapapun bisa bergabung," ujarnya.

Banyak hal sudah Kika dapatkan setelah bergabung dengan Kemangteer, terutama mengenai pelestarian mangrove. Semisal bagaimana melestarikannya, mengelola organisasi, menjalin relasi bersama tokoh lingkungan hidup, dan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Karena baginya mangrove bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi kompleks bahkan mencakup masalah sosial.

Hanya saja Kika menyayangkan, sekarang ini masyarakat kurang peduli dengan perkembangan ekosistem mangrove. Tanpa kita sadari, imbuh ia, sebagian besar hutan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan bisa berasal dari alam maupun ulah nakal tangan manusia. Pasalnya



40% hutan mangrove dunia itu berada dalam tanah air tercinta Indonesia.

Maka demikian, Kika bersama anggota Kemangteer lainnya tak kenal lelah untuk selalu mengampanyekan pelestarian mangrove. Menurutnya, bermodal mental kuat dan semangatlah komunitas ini bisa selalu eksis di masyarakat hingga kini. "Kami sukarelawan, tidak mencari profit, jadi apa yang kami lakukan murni ingin berkontribusi melestarikan dan menyelamatkan ekosistem mangrove," jaluasnya.

Ia pun berharap, masyarakat Indonesia bisa terinspirasi dengan adanya Kemangteer. Terlebih dapat pula meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap mangrove. Untuk Kemangteer kedepannya berkeinginan membentuk empat jaringan kerja besar yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni wilayah pusat dipimpin di Semarang, wilayah barat berpusat di Jakarta, wilayah tengah bertempat di Balikpapan, dan wilayah timur berada di Papua.

Salah satu anggota Kemangteer asal Semarang, Faisal Rachmansyah merasa senang bisa bergabung dengan komunitas pecinta mangrove ini. Menurutnya melalui Kemangteer dirinya dapat berinteraksi dan memahami kehidupan masyarakat pesisir. Ia bisa pula mengunjungi destinasi konservasi mangrove di seluruh Indonesia. Terlebih ia

pun kerap kali mendampingi masyarakat untuk mempelajari dan menanam mangrove.

Sejalan dengan itu, Faisal berharap kehadiran Kemangteer dapat mampu memperluas program kampanye Yayasan IKAMAT dalam mengatasi dan menyelamatkan degradasi mangrove di wilayah pesisir Indonesia.

Dalam pelestariannya, mangrove membutuhkan Relawan yang memiliki loyalitas dan tingkat kepedulian yang tinggi. "Karena 80% lebih, hutan mangrove di Indonesia telah rusak dan ini merupakan bencana ekologis terbesar di bumi," keluhnya, Selasa (11/10/16).

Untuk itulah, ia menyarankan, bagi masyarakat yang berkomitmen melestarikan lingkungan dan ingin mendirikan komunitas peduli mangrove sangat dipersilahkan. Karena baginya melindungi lingkungan sekitar ialah hak setiap orang. "Kalau sudah niat, pasti sulit dibendung. Bahkan bisa saja menembus batas, tak peduli kota, asal usul budaya, dan latar belakang," katanya beberapa bulan silam.

Faisal menilai, tiap konsep kegiatan yang dibangun dalam Kemangteer selalu berlandaskan ketulusan, kejujuran, kesukarelawan dan keterbukaan. Ia pun berkeinginan agar nantinya mangrove dapat menjadi sebuah gaya hidup.

Sebab, selain menjaga ekosistem alam. Mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hasil olahan mangrove berupa kain batik, sirup, krupuk, dan kripi. "Moga saja virus, atau *Mangrove Is Life style* bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Jadi memangrovekan masyarakat dan memasyarakatkan mangrove," pungkas pria kelahiran Semarang ini.

HASILKAN KARYA IDEALIS



Syah Rizal

Tak sedikit musisi dalam negeri memilih untuk tak terikat pada perusahaan label rekaman besar. Semua proses mereka kerjakan secara *indie* demi menghasilkan karya sesuai idealisme.

INDIE merupakan kepanjangan dari independen. Pada prosesnya, musisi yang bergelut di dunia musik *indie* mengerjakan musik tanpa campur tangan dari label rekaman besar. Sebab itu, jenis musik yang mereka hasilkan cenderung memberikan musik alternatif dan tidak tergantung dengan pangsa pasar musik yang tengah tren dan populer.

Para musisi *indie* bebas berkarya menciptakan lagu hingga album musik berdasarkan ekspresi mereka. Musisi *indie* juga selalu dapat memikat masyarakat dengan lagu-lagu *indie* mereka bawakan. Terbukti setiap musisi *indie* memiliki komunitas penggemarnya.

Pada era 1980-an di Amerika Serikat dan Inggris, musik *indie* mulai diperkenalkan lewat tangga lagu. Saat itu musik *indie* diberi ruang untuk bersaing dengan musik-musik populer. Band-band *indie* pun ikut bermunculan. Di era 80-an, ada The Smiths dan Joy Division. Lalu di era 90-an ada Nirvana dan Radiohead.

Kala itu, genre musik grunge yang dipopulerkan Nirvana juga menjadi akar dari musik *indie* di awal 90-an. Sementara itu, Radiohead sukses menjadi band *indie* terbaik atas karya *indie* mereka. Bahkan tahun 2007 band asal Inggris ini merilis album independen *In Rainbows* dengan sistem pembayaran *pay-what-you-like* di mana para pembeli bebas membayar berapapun un-



Sumber: vemale.com

tuk membeli album mereka.

Kini, istilah *indie* sudah menjadi sebuah genre musik. Genre *indie* dikenal sebagai musik yang tidak mainstream dan berbeda. Dari genre *indie* memunculkan genre-genre lainnya seperti *indie rock*, *indie pop*, dan *indie metal*.

Indie rock jadi genre favorit di kalangan band-band *indie* sekaligus jadi akar dari musik *alternatif rock*. *Indie rock* semakin populer di tahun 2000-an dengan munculnya Arctic Monkeys dan The White Stripes.

Sementara itu, demam musik *indie* di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000 sampai sekarang. Musik *indie* yang berkembang tidak terlepas dari dukungan label-label rekaman independen yang semakin banyak pula. Misalnya label Aksara Records, De Majors, dan FFWD Records yang belakangan ini tengah gencar mempromosikan artis-artisnya.

Sistemnya, perusahaan rekaman *indie* akan menyediakan wadah dan jaringan distribusi yang meluas bagi band-band beraliran

post-punk, *indie pop*, folk, *indie rock*, *electronic*, *metal*, *alternative rock*, dan yang lainnya. Pembagian hasil pun seimbang antara label dan band. Untuk produksi dan penjualan, perusahaan rekaman *indie* akan memandu musisi atau band *indie* agar bebas berekspresi, berinovasi yang bertujuan memperkenalkan musik yang mereka sukai.

Selain dukungan dari label rekaman *indie*, ada juga musisi *indie* yang memproduksi karyanya secara mandiri seperti Slank (Slank Records), Glenn Fredly (Musik Bagus), Sandhy Sandoro (Sandoro Music), dan Raisa Andriana (June Records).

Belum lama ini Raisa Andriana turut meramaikan musik *indie* di Indonesia. Pada November 2015, pelantun tembang *Pemeran Utama* ini memilih berkarir secara mandiri. Bukan karena ego atau dirinya yang susah diatur, Raisa hanya ingin mengeksplorasi kemampuannya di dunia tarik suara.

Sebelumnya, di album *Raisa*

dan *Heart to Heart* Raisa memproduksi lagu-lagunya sendiri namun ia masih bekerja sama dengan Universal Music Indonesia. Wanita kelahiran 1990 ini menilai keputusannya memilih jalur *indie* menuntutnya untuk lebih kreatif lagi.

Sementara itu, Vokalis Barasua, Iga Massardi merasa adanya aliran *indie* membuat persaingan di industri musik semakin pesat dan sehat. Perusahaan rekaman *indie* juga membuka peluang untuk masyarakat yang ingin karyanya agar didengar tanpa membuat cd demo dan album datang ke label besar.

Musik Indie di Era Digital

Menjamurnya musik *indie* juga didukung kemajuan teknologi internet. Sekarang, setiap musisi *indie* bisa dengan mudah memperkenalkan karyanya kepada masyarakat luas lewat jejaring sosial YouTube atau SoundCloud.

Iga Massardi bercerita saat awal tahun 2000 remaja kala itu terbiasa untuk disuguhi infor-



Sumber: youtube.com



Sumber: goaheadpeople.com

“Jadi di era digital ini sebetulnya sangat menguntungkan musisi *indie*,”

masi tentang musik yang sama dan dimonopoli media seperti televisi dan majalah. Ketika internet belum mempunyai peran penting terhadap musik *indie*, Iga dan teman-temannya hanya mengenal Sheila on 7 lantaran minimnya kanal informasi yang menyebabkan dirinya tak mengenal musisi *indie*.

“Musisi *indie* saat 2000-an awal tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke televisi atau majalah. Sekarang pegiat musik *indie* sudah tidak butuh itu karena kita punya media sendiri di *channel* Youtube secara gratis,”

ungkap Iga.

Youtube dan SoundCloud di era digital menjadi solusi tepat menurut Pengamat Musik Bens Leo. Menurutnya sekarang penjualan karya fisik (kaset, cd, atau vinyl) sudah tidak selaku dulu lagi. Kalau era analog, lanjutnya, biaya produksi musik terbilang mahal.

“Jadi di era digital ini sebetulnya sangat menguntungkan musisi *indie* karena dengan adanya format digital, biaya produksi hingga distribusi bisa jadi murah sekali jika dibandingkan dengan era analog dulu,” tutup Bens Leo.

BAND INDIE PILIHAN INSTITUT



[1] Naif

Siapa tak kenal Naif? Naif merupakan band yang namanya tidak asing di telinga. Dengan lagu retro mereka yang khas, band ini lebih memilih jalur indie untuk menyalurkan ekspresi. Kebebasan berkarya dalam bermusik pun jadi alasan mereka memilih jalur indie. Band ini terbentuk pada tanggal 22 Oktober 1995, band asal Jakarta ini beranggotakan David (Vokal), Emil (Bass, Vokal), Jarwo (Gitar, Vokal), dan Pepeng (Drum).

[2] Efek Rumah Kaca

Band yang kerap kali disingat namanya jadi ERK ini salah satu band Indie dari Jakarta yang terbentuk tahun 2001 dengan formasi Cholil Mahmud (vokal, gitar), Adrian Yunan Faisal (vokal latar, bass), Akbar Bagus Sudiby (drum, vokal latar). Tak lama setelah peluncuran

album pertama ERK begitu membuat kaget karena mereka berhasil menjadi Nominator AMI Award 2008, Rookie of The Year 2008 oleh Majalah Rolling Stone, dan peraih penghargaan MTV Music Award 2008 dengan kategori The Best Cutting Edge.

[3] The S.I.G.I.T.

The S.I.G.I.T. adalah kependekan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent. Band bergenre Rock'n Roll asal Bandung, Indonesia kerap kali membuat kagum pencita musik Indonesia bahkan Australia melihat penampilan band indie yang terbentuk tahun 1997 ini. Tak lama setelah peluncuran album *Visible Idea of Perfection*, The S.I.G.I.T. semakin terkenal hingga dapat kesempatan untuk konser di Australia dan Amerika. Band ini beranggotakan Rektiviaton

Yoewono (Vokal, Gitar), Aditya Bagja Mulyana (Bas, Vokal), Farri Icksan Wibisana (Gitar, Vokal), dan Donar Armando Ekana (Drum)

[4] White Shoes And The Couples Company

White Shoes And The Couples Company terbentuk di Jakarta tahun 2002. Mengusung genre pop/funk/jazz, band indie ini dapat dikatakan sebagai salah satu band yang konsisten dengan gaya retro tahun 70an dengan formasi Saleh Husein (Gitar, Vokalis), Aprilia Apsari (Vokal), Rio Farabi (Gitar, Vokal), John Navid (Drum), Aprimela Prawidyanti (Piano, Viola, Synth, Keyboards, Vokal), Ricky Surya Virgana (Kontra Bass, Cello, Bass, Vokal) Penampilan Aprilia Apsari yang mahir berdansa ala retro 70'an juga jadi daya tarik tersendiri.

[5] Sore

Sore merupakan band Indie asal kota Jakarta yang beranggotakan Reza Dwi Putranto (gitar, vokal), Ade Firza Paloh (gitar, vokal), Awan Garnida (bass, vokal), Ramondo Gascaro (piano, keyboard, gitar, vokal), Bemby Gusti Pramudya (drum, perkusi, vokal). Uniknya Sore dapat menjadikan setiap personilnya agar mengambil bagian sebagai vokalis di setiap lagu mereka.

[6] The Trees and The Wild

The Trees and The Wild adalah hasil perpaduan dari tiga orang sahabat yakni Iga, Andra, dan Remedy. Dengan mengusung Musik akustik sederhana, mudah dicerna dan sangat minimalis membuat The Trees and The Wild selalu di tunggu penampilannya oleh para pecinta Indie musik tanah air.

BUDAYAWAN
SUJIWO TEJO

BUDAYA HILANG, SALAH SIAPA?

Indonesia memiliki budaya yang melimpah ruah. Sampai-sampai ada yang terbengkalai bahkan diklaim negara tetangga.

BERDASARKAN buku *Ensiklopedia Populer Pulau-pulau Kecil Nusantara*, Indonesia memiliki tak kurang dari 17.504 pulau. Belum lagi budaya, suku, agama, bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia yang sangat beragam membuat Indonesia digadang sebagai negara yang kaya.

Tak sedikit bangsa lain yang ikut terpesona oleh indahny kekayaan budaya Indonesia. Namun kebudayaan yang sangat beragam ini sayangnya banyak yang tidak diperhatikan lagi, hampir punah dan bahkan akhirnya diakui oleh negara lain.

Melihat kebudayaan Indonesia yang ikut tergerus oleh perkembangan zaman, reporter *Institut*, **Jeannita Kirana**, mewawancarai budayawan kondang bernama Agus Hadi Sujiwo atau yang akrab dipanggil Sujiwo Tejo. Berikut petikan wawancara dengan Presiden Republik Jancukers ini.

Menurut pandangan Mbah, bagaimana budaya Indonesia sekarang ini?

Zaman sekarang banyak kebudayaan asli Indonesia yang sudah tidak digemari masyarakatnya sendiri. Misalnya saja kesenian wayang, sekarang tak begitu banyak orang yang kenal. Selain itu, budaya Indonesia yang mulai ditinggalkan ialah pertanian tradisional. Dahulu kala para petani mengusir wabah atau hama melalui ritual dan doa-doa, sekarang petani malah beralih memakai pestisida tanpa menghiraukan seni berdoa itu. Jadi, banyak yang tak kenal budaya sendiri tapi sudah mengetahui budaya luar seperti Hollywood (budaya barat) ataupun Korea. Ibaratnya adalah tujuannya sudah ada tapi pijakannya dilupakan. Sehingga orang-orang tahu mau pergi kemana tapi tidak tahu datang dari mana.



Sumber: flickr.com



Sumber: Internet

Bagaimana tanggapan Mbah melihat budaya Indonesia yang kini diakui oleh negara lain?

Tergantung dari bagaimana orang mendefinisikan arti seorang ibu bagi dirinya. Ibu di sini dianggap sebagai nusantara. Jadi apakah ibu adalah seorang yang melahirkan anaknya ke dunia atau seorang yang merawat dan membesarkan anaknya. Apabila definisi ibu adalah yang melahirkan, maka kebudayaan itu punya kita. Tapi, saya pribadi menganggap ibu adalah seorang yang merawat serta membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Sehingga apabila kebudayaan Indonesia yang dimaksud tidak dirawat lagi, ya sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengakui kebudayaan tersebut milik kita.

Lantas apa yang harusnya dilakukan kalau budaya Indonesia diambil negara

lain?

Saat ini sudah tak ada lagi ruang-ruang khusus untuk menggelar pertunjukan seni. Dampaknya bisa kita lihat dengan jelas, misalnya kesenian kuda lumping yang sekarang sering dilakukan di lampu merah jalanan. Lalu, masyarakat Indonesia juga kini lebih memilih untuk mengadakan berbagai perayaan dengan pertunjukan seni yang sudah modern ketimbang seni tradisional seperti kuda lumping yang terkesan ketinggalan zaman. Ketika kesenian kuda lumping sudah terjun ke jalanan karena tak dilestarikan dan kemudian diakui oleh negara lain, kita tak boleh menyalahkannya. Intinya, sebagai bangsa Indonesia harusnya kita lebih introspektif. Jangan asal menyalahkan negara lain saja.

Sesungguhnya melestarikan kebudayaan dan kese-

nian milik bangsa sendiri itu tugas siapa?

Menurut saya, siapapun orang yang menyukai dan mencintai kebudayaan serta ke seni berkewajiban untuk mempertahankannya. Sebab, birokrasi pemerintahan kita sulit. Akan lama prosesnya bila menunggu aksi dari pemerintah.

Bagaimana dengan andil dari para budayawan untuk menjaga kebudayaan dan kesenian Indonesia?

Andil dari para budayawan itu tak terlalu banyak. Sebab, peran orang tua dalam keluarga lah yang paling besar. Jadi, mau budayawan atau guru mengajarkan suatu apapun itu kalau di rumah tidak dibentuk akan percuma saja. Contohnya yaitu anak yang gemar membaca. Biasanya, hobi membaca tersebut terbangun karena lingkungan sekitarnya memiliki hobi yang sama. Bisa jadi ayah,

ibu, kakak, paman, atau tantenya juga gemar membaca.

Kira-kira berapa persen budaya Indonesia yang sudah terjaga?

Ada sekitar 30 persen budaya di Indonesia yang sudah terjaga. Sekarang sudah zamannya era reformasi. Peran media massa pun sangat penting. Tak seperti dulu, informasi yang disuguhkan ke masyarakat bisa diatur, misal media harus menayangkan sedikitnya 30 persen siaran lokal. Zaman sekarang, pemerintah tak lagi punya kekuasaan atas media publik seperti itu.

Bagaimana kondisi remaja kini jika dikaitkan dengan budaya?

Saya merasa prihatin melihat remaja zaman sekarang. Seharusnya remaja lebih mengenal budaya sendiri ketimbang budaya asing. Setiap harinya para remaja dijejali dengan budaya asing yang kebanyakan tak mendidik. Akibatnya adalah kedangkalan nalar berpikir dan tingkah laku yang destruktif seperti tawuran, miras, narkoba, dan pergaulan bebas.

Menurut Mbah apa permasalahan utama yang diha-

dapi bangsa Indonesia?

Permasalahan inti yang dialami bangsa kita bukanlah soal pilpres ataupun pileg tapi tingkat percaya diri yang rendah. Kita tidak punya kepercayaan diri yang tinggi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita lupa bahwa dulu bangsa kita adalah bangsa yang besar karena punya percaya diri yang besar pula. Budaya apapun yang masuk ke Indonesia diolah terlebih dahulu sehingga menjadi milik kita. Kemampuan mengolah budaya itulah yang sekarang hilang.



Sumber: Internet



Sumber: Internet

RESENSI FILM

Whiskey Tango Foxtrot

Erika Hidayanti

Sudah menjadi tugas jurnalis untuk mencari berita setiap harinya. Termasuk bagi mereka jurnalis yang ditugaskan di daerah konflik.

SEORANG jurnalis perempuan bernama Kim Baker tiba-tiba ditugaskan untuk menjadi reporter di medan perang. Ia dikirim ke Afganistan untuk melaporkan berita-berita terbaru terkait konflik yang terjadi di sana. Begitu sampai, ternyata tantangan yang dihadapi tak semudah yang Kim kira. Budaya serta adat istiadat di sana menjadi kejutan baginya.

Sejak awal, ia sudah terkejut dengan ditematkannya ia dan semua wartawan dalam sebuah gedung. Di dalam gedung itu dirinya menjadi jurnalis pe-

rempuan kedua yang tinggal. Jurnalis perempuan satunya adalah Tanya Vanderpoel. Puluhan jurnalis tinggal satu atap dan sering melakukan pesta sebagai penghilang penat mereka bertugas di daerah konflik.

Saat melakukan tugas pertamanya Kim ikut dengan rombongan militer dan mewawancarai beberapa tentara di sana. Saat itu, Kim masih merasa asing dan takjub dengan apa yang terjadi di Afganistan sepanjang perjalanan ia melihat kota yang hancur dan masyarakat dengan wajah yang murung. Bahkan anak-anak

bermain di sekitar puing-puing bangunan.

Tak disangka, setelah itu Kim mendapat kesempatan untuk melihat baku tembak antar tentara dan pasukan pemberontak. Dengan penuh keberanian Kim turun dari mobil dan ikut tiarap serta mengambil gambar baku tembak tersebut. Meski diteriaki beberapa kali oleh Kolonel Hollandek Kim terus merekam kejadian tersebut.

Usai konflik yang akhirnya ia lihat langsung itu Kim pun mendapat pujian dan beritanya langsung tayang. Dari sini, Kim mulai menyukai pekerjaannya sebagai jurnalis di daerah konflik. Dirinya pun semakin terobsesi untuk terus mencari berita.

Sampai akhirnya Kim bertemu dengan Perdana Menteri Afganistan, Ali Massoud Sadiq. Karena kecantikan Kim, Ali tertarik dan menggoda Kim selama proses wawancara. Kim awalnya merasa risih, namun ia berusaha bersikap tenang karena ia butuh Ali sebagai narasumbernya.

Keterarikan Ali pada Kim membawanya pada keberuntungan lain. Kim kemudian berkesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan seorang panglima perang yang sangat berpengaruh di konflik Afghanistan, Pacha Khan. Ia menjadi jurnalis Amerika pertama yang berhasil mewawancarai Pacha Khan semenjak konflik dengan Uni Soviet pada Perang Dunia II.

Dalam tugasnya, Kim selalu ditemani Fahim, sebagai pemandu serta penerjemah. Fahim se-

cari berita. Di tengah perjalanan mereka melihat aksi masa yang sedang berorasi, Kim yang merasa itu kesempatan langka langsung turun dari mobil dan masuk di tengah kerumunan para lelaki.

Fahim berteriak dan memperingatkan Kim, namun ia acuh. Kim kemudian terlihat mencolok sebagai satu-satunya perempuan di antara kerumunan, padahal di sana perempuan tidak boleh masuk ke dalam kerumunan lelaki. Kim pun tertangkap basah sedang merekam dan langsung diusir.

erjemahnya serta seorang tentara yang harus kehilangan matanya akibat melindungi Tanya.

Kim marah dan kecewa pada Tanya. Ia pun kemudian tersadar bahwa selama ini mereka banyak mengobankan orang lain demi mendapatkan berita. Kim pun merasa sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri.

Di akhir cerita, Kim kembali berhasil membuat berita terkait konflik dengan pasukan pemberontak. Setelah itu, ia kembali ke Amerika dan menjadi pembawa berita sedangkan Ian meneruskan perjuangannya di daerah konflik.

Whiskey Tango Foxtrot mencoba membawa penonton merasakan pengalaman jurnalistik di daerah konflik dalam perpaduan drama dan komedi. Tak hanya menyajikan cara jurnalis mendapat berita, namun juga menyajikan sisi lain kehidupan jurnalis di sana.



Sumber: Internet

benarnya seorang dokter, namun, semenjak konflik terjadi Fahim bekerja sebagai pendamping dan penerjemah bagi jurnalis asing.

Dalam film berdurasi hampir dua jam ini dikisahkan juga bahwa Kim akhirnya menjalin kasih dengan seorang fotografer Skotlandia bernama Iain MacKelpie (Martin Freeman). Ia dan Ian pun sering melakukan tugas liputan bersama.

Perjalanan mulus Kim menjadi jurnalis konflik mulai terusik ketika dirinya telah melanggar adat di sana. Suatu hari, Ia, Fahim, Ian, dan Brian (wartawan lainnya) pergi ke kota untuk men-

Sejak saat itu, Fahim berhenti dan tak mau lagi mendampingi Kim. Menurut Fahim Kim sudah terlalu terobsesi dengan berita sehingga tak memperdulikan lagi keselamatan dan etika. Tak hanya itu, Kim tiba-tiba kehilangan jatahnya untuk siaran.

Hal tersebut karena konflik Afganistan sudah dianggap tak menarik lagi. Selain itu, tanpa diduga Tanya telah menggantikan posisinya. Tanya berhasil merekam kejadian bom dan melaporkannya ke kantor berita. Namun, untuk kontrak berita itu Tanya harus mengorbankan nyawa Jaweed, pendamping dan pen-



Sumber: Internet

Judul Film	: Whiskey Tango Foxtrot
Tanggal rilis	: 4 Maret 2016
Sutradara	: Glenn Ficarra John Requa
Adaptasi dari	: The Taliban Shuffle
Durasi	: 150 Menit
Cerita oleh	: Robert Carlock
Skenario	: Robert Carlock

Menapaki Sejarah Kerajaan Melayu



Sumber: Internet

Ika Puspitasari

Pulau Penyengat bukan sekadar destinasi biasa. Sejarah kerajaan Melayu melekat di setiap sudut pulau.

JARAK antar Bandara Hang Nadim, Batam, dan Pulau Penyengat sekitar 65 km. Untuk menuju ke Pulau Penyengat, pengunjung dapat menggunakan taksi ke Pelabuhan Punggur dengan tarif Rp100 ribu. Sepanjang 60 menit perjalanan menuju Pelabuhan Punggur, wisatawan akan melewati jalanan dengan pemandangan pinggir laut. Ada beberapa jembatan yang menghubungkan satu daratan ke daratan lainnya hingga sampai ke Pelabuhan Punggur.

Dari Pelabuhan Punggur, wisatawan perlu menyeberang menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang menggunakan *speedboat* seperti Marina Jaya, Baruna Jaya, Oceana, dengan tarif Rp60 ribu. Waktu

tempuh dari Pelabuhan Punggur ke Pelabuhan Sri Bintan Pura perlu waktu sekitar 45 menit. Sempainya di Pelabuhan Sri Bintan Pura, wisatawan dapat menggunakan perahu motor atau sering disebut *pompong* menuju Pulau Penyengat dengan mero-goh kocek Rp8 ribu.

Bangunan bercat kuning di tengah sebuah pulau terlihat jelas di seberang Pelabuhan Sri Bintan Pura. Pulau dengan luas 2500x750 m itu berjarak 2 km dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang. Tepat di depan dermaga, berdiri kokoh Masjid Raya Sultan Riau, masjid ini menjadi salah satu destinasi para pengunjung Pulau Penyengat.

Masjid Raya Sultan Riau memiliki empat menara, ber-

balut cat kuning, dan konon katanya pembangunan masjid ini tak menggunakan semen sebagai perekatnya, tapi menggunakan telur. Masjid ini menyimpan dua mushaf Alquran dengan tulisan tangan di dalam peti kaca persis berada di depan pintu masuk. Salah satu mushaf ditulis oleh Abdurrahman Stambul, ia merupakan Putera Riau Pulau Penyengat yang pernah belajar ke Turki pada 1867. Selain mushaf, terdapat juga kitab-kitab kuno yang merupakan koleksi dari perpustakaan yang didirikan oleh Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau X.

Dari masjid itu perjalanan dilanjutkan dengan mengikuti jalan *paving block* menuju pe-

makaman keluarga kesultanan Johor-Riau. Ada makam Engku Putri Raja Hamidah, permaisuri dari Sultan Mahmud Marhum Besar, makam Raja Ahmad yang merupakan penasihat kerajaan, Raja Ali Haji pujangga kerajaan, dan makam Raja Abdullah IX beserta permaisurinya, Aisyah. Ketika masuk di bangunan makam, pengunjung akan melihat puisi-puisi yang terukir di dinding, puisi tersebut merupakan karya Raja Ali Haji yang terkenal dengan sebutan Gurindam 12.

Terdapat pula kompleks pemakaman YDM Riau VI Raja Ja'afar dan YDM Riau VIII Raja Ali Marhum. Di depan gerbang untuk pengunjung menuju makam tersebut, terdapat sebuah bangunan berwarna kuning lengkap dengan kubah berbalut cat kuning yang merupakan makam para sultan melayu.

Tak jauh dari kompleks pemakaman, persis menghadap ke pantai, berdiri Balai Adat Melayu Indera Perkasa yang dibuat dengan bahan dasar kayu. Bangunan ini digunakan apabila ada pernikahan serta kegiatan adat melayu. Di halaman Balai Adat, ada balai utama dengan ukuran besar serta lima balai kecil di kedua sisi. Di dinding balai itu juga terdapat gurindam 12 dan lukisan beberapa sultan di kerajaan melayu tersebut.

Dalam balai utama, terdapat tiga pelaminan dengan hiasan kain merah, kuning, biru sebagai hiasannya. Puas berkeliling di Balai Adat, pengunjung akan dibuat penasaran dengan Bukit Kursi. Pengunjung harus mengikuti jalan setapak untuk naik ke atas bukit. Konon, bukit ini adalah benteng pertahanan Kerajaan Johor. Di atas Bukit Kursi, pengunjung dapat melihat laut luas, serta



Sumber: Internet

delapan meriam.

Ada jalur lain untuk turun dari bukit, bukan jalan setapak, tapi anak tangga, setelah turun dari bukit, pengunjung akan kembali ke Masjid Raya Sultan Riau. Salah satu mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Luigi Sepraliani bercerita bahwa Pulau Penyengat ini merupakan mahar dari Sultan Mahmud untuk menikahi Engku Putri Raja

Hamidah, putri dari Raja Haji Fisabilillah YDM Riau IV.

Sedangkan salah satu pengunjung, Nurul Anggraini Siregar menyatakan, berwisata ke Pulau Penyengat mendapatkan banyak pengetahuan. "Selain jalan-jalan, kita dapat mengetahui sejarah sultan-sultan dan sejarah tentang kerajaan Johor-Riau-Lingga pada abad 18-an," ungkap Nurul.



Sumber: Internet

PENERAPAN SYARIAH MENUAI PRO KONTRA

M. Rizky Rakhmansyah

Penerapan syariah di suatu negara tak berjalan lurus. Alasannya, dinilai hanya menguntungkan umat Islam.

TAK dapat dipungkiri syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Terlebih, bagi negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama Islam. Umat Islam umumnya mengartikan syariah sebagai pedoman bagi mereka dalam mengembangkan kehidupannya baik secara individual maupun bermasyarakat.

Perkembangan syariah dimulai sejak tahun 750 masehi yakni pada masa Abbasiyah awal. Pada saat itu, pandangan tentang perkembangan syariah diperjelas oleh mazhab-mazhab utama pemikiran (*madzhab*). Walhasil, pada saat itu muncul tokoh-tokoh Islam berpengaruh seperti Ja'far Al-Shadiq (pendiri aliran utama ilmu hukum syiah), Abu Hanifa, Malik, Al-Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Tak hanya itu, As-Sunnah mulai dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai sumber syariah yang kedua.

Perkembangan syariah dari madzhab-madzhab tersebut terus dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sosial, politik, dan demografis. Di satu sisi, pemerintah juga mendukung mazhab tertentu untuk diadopsi menjadi hukum di negara tersebut.

Penerapan konsep syariah yang diadopsi oleh suatu madzhab otomatis telah melegiti-

masi kekuasaan islam dalam negara tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat berbagai macam problematika.

Seperti yang terjadi di Dinasti Fathimiyah. Dinasti yang mengadopsi syariah berdasarkan madzhab Syiah ini, mengalami kekalutan dalam model praktik kelembagaan negara. Penggabungan tugas dan tanggung jawab keuangan yang dimiliki pengadilan privat (*mazalim*) memberikan kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kepala Polisi (*shahib al-shurta*) selain memiliki fungsi pengekskusi pelaku kejahatan juga berperan menginterogasi, menjadi pengekskusi hukuman dan mengelola penjara. Tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga negara menimbulkan ketegangan di antara para pejabat.

Di masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim penganiayaan atas agama juga terjadi. Selain melakukan penghancuran gereja, Al-Hakim juga melakukan seruan untuk menganiaya orang-orang non-Islam. Tahun 1004-1012 M, gereja dan biara di Kairo sudah dihancurkan. Ia juga merampas wakaf seluruh gereja dan biara pada masa itu.

Adanya ketidaksamaan perlakuan masyarakat terjadi di Dinasti Utsmani. Masyarakat

Kesultanan Utsmani terbagi ke dalam kelompok elite penguasa (*Askeriyye*) dan Rakyat (*Raiyye*). Elite penguasa yang bebas dari kewajiban pajak karena mereka melayani negara terdiri dari 4 kelompok: (1) kalangan istana (rumah tangga sultan), (2) elite militer (*seyfiyye*), (3) kalangan terpelajar yang dipekerjakan pemerintah (*ilmiyye*—yang sebagian adalah para ulama) dan (4) birokrat (*kalemiyye*). (Hal 344)

Sementara itu, kelompok rakyat juga terbagi menjadi beberapa kelompok: tarekat, para ulama yang terlibat dalam pemerintahan, para seniman, dan juga non-muslim (*Millets*). Tak jarang, terjadi konflik antar kelompok tersebut lantaran tingkat otonomi yang berbeda.

Berbeda dengan keduanya yang sudah mengadopsi syariah, Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum. Ayat 2 pasal 29 UUD 1945 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nahas, hanya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu saja agama yang diakui oleh negara. Padahal, masih banyak agama lokal yang terdapat di Indonesia.

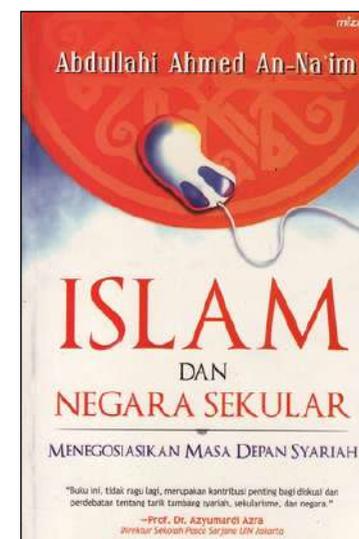
Suku Badui, kelompok orang yang tinggal di Provinsi Banten, memercayai Batara Tunggal sebagai manusia yang memiliki kekuatan tak terbatas dan tak terkalahkan. Selain Batara Tunggal, arwah leluhur juga dianggap sebagai sosok yang telah menyediakan tempat bermukim suku Badui.

Terdapat pula agama-agama lokal yang terdapat di Kepulauan

Indonesia. Seperti di Sumatera Utara, orang Batak Toba menganut agama pormalin. dan juga, Agama Wana yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Sayangnya, hingga kini, negara Indonesia tidak mengakui keragaman kepercayaan lokal dan sekte-sekte agama baru. Pemerintah cenderung memaksa pemeluk agama lokal untuk mengintegrasikan kepercayaan mereka dengan agama resmi yang diakui negara.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendirikan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Bakor Pakem) yang bertugas mengawasi praktik-praktik dan melarang keagamaan sinkretis. Walhasil, praktik diskriminatif terus dialami oleh masyarakat penganut agama lokal ini.

Buku Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah karya Abdullahi Ahmed An-Na'im memberikan pandangannya dalam menolak penerapan syariah yang dipaksakan oleh pemerintah. Melalui buku ini, penulis berusaha memberikan pemahamannya akan pemisahan negara dari agama, terkhusus Islam.



Sumber: Internet

Judul Buku : Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah
 Pengarang : Abdullahi Ahmed An-Na'im
 Penerbit : Mizan
 Tahun : 2007
 Tebal : 506 Halaman

SURVEI WARUNG MAKAN FAVORIT MAHASISWA

MAKANAN merupakan kebutuhan pokok bagi manusia tak terkecuali mahasiswa. Bagi kebanyakan mahasiswa, memburu warung makan di sekitar kampus yang enak dan murah sudah jadi hal wajar. Seperti di sekitar kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyediakan banyak pilihan kuliner enak serta sesuai dengan kantong mahasiswa, dari makanan ringan sampai makanan berat.

Mahasiswa tentu akan memilih warung makan yang ekonomis sekaligus sedap. Kampus UIN Jakarta yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini tersebar banyak warung makanan yang kebanyakan pelanggannya merupakan mahasiswa. Warung makan tersebut di antaranya berada di Jalan Pesanggrahan, Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta, Legoso, Semanggi, serta sekitar Kampus 2 UIN Jakarta.

Berikut ini, beberapa warung ekonomis menurut mahasiswa UIN Jakarta:



Warung Nasi Padang Sabana Murah (18.5%)

Di Warung Nasi Padang Sabana Murah, mahasiswa sudah bisa menyantap nasi padang dengan lauk telur dadar atau telur balado lengkap dengan sambel ijo, lalapan daun singkong, serta kuah sayuran khas Padang dengan Rp8 ribu. Apabila ingin menyantap ayam bakar ataupun ayam goreng, mahasiswa hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp12 ribu, dan Rp10 ribu apabila ingin makan dengan lauk berbagai olahan ikan, seperti ikan goreng dan ikan bakar.



Warung Makan Pelangi (17%)

Warung Makan Pelangi yang berada di jalan Pesanggrahan ini menyajikan makanan dengan paket ayam goreng dengan harga Rp11 ribu di mana mahasiswa dapat menyantap nasi dengan lauk ayam, tempe, dan tahu goreng. Apabila ingin menambah es teh manis, mahasiswa hanya perlu menambah Rp3 ribu. Selain itu, warung pelangi juga menyediakan mie rebus dan goreng bagi pembeli yang menginginkan mi.



Warung Sunda Mang Sadi (12.5%)

Warung makan Sunda yang terletak di samping Masjid Al-husna ini menyajikan makanan dengan lauk khas Sundanya. Di warung ini tersedia berbagai jenis lauk seperti aneka masakan telur, ikan, ayam, tempe, dan tahu balado, dan berbagai macam sayuran. Mahasiswa cukup mengeluarkan uang sebesar Rp8 ribu, mereka sudah dapat menyantap nasi dengan lauk telur dadar, dan *karedok*.



Warung Makan Warsito (12%)

Warung makan yang berada di dekat Madrasah Pembangunan UIN Jakarta ini memang banyak dicari banyak mahasiswa. Warung khas Purwokerto ini menyajikan paket makan Rp10 ribu di mana kita dapat menyantap ayam paha goreng juga tempe mendoan khas Purwokerto. Tak melulu dengan menu ayam goreng, di sini juga menyediakan pecel lele dengan harga Rp10 ribu dan soto ayam seharga Rp10 ribu.



Warung Pojok (Warjok) Pak Deddy Legoso (12%)

Sebenarnya menu makanan di warjok tak terlalu berbeda dengan menu makanan yang ada di Warung Tegol (warteg). Namun yang berbeda dengan warung makan ini adalah pilihan lauk pauk yang lebih banyak dengan harga yang terbilang murah. Mahasiswa sudah dapat makan nasi beserta tempe dan tahu balado, serta sayuran dengan membayar Rp6 ribu dan Rp10 ribu untuk mahasiswa yang ingin makan nasi, ayam goreng, dan mi goreng. Selain itu, warung ini buka 24 jam.



Warung Tegol (warteg) Pujasera (9%)

Siapa yang tak tahu warteg. Di setiap sudut kota kita akan mudah menjumpai warteg, apalagi di sekitar kampus UIN Jakarta. Ada beberapa warteg berada di sekitar kampus UIN Jakarta yang terkenal dengan harga yang murah meriah. Salah satunya Warteg Pujasera yang berada di Jalan Pesanggrahan. Mahasiswa cukup mengeluarkan uang Rp8 ribu untuk membeli nasi beserta telur dadar dengan cah kangkung.



Warjok Thampomas (8%)

Tak jauh berbeda dengan warjok yang di Legoso, warjok yang berada di samping Asrama Putri (aspi) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta ini menyediakan banyak menu. Begitu juga dengan harganya yang ekonomis, cukup membayar Rp9 ribu mahasiswa dapat mengganjal perut dengan nasi dengan lauk ikan balado dan sayur sop.



Warteg Bu Kiki (3.5%)

Warung Tegol yang berada di jalan Semanggi 2 ini memang tak asing lagi bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang berdomisili di sekitar Semanggi 2. Sama seperti warteg yang lainnya, warung ini menyediakan berbagai nasi dengan berbagai lauk dan sayuran. Di Warteg Bu Kiki, dengan Rp10 ribu mahasiswa sudah dapat membeli nasi beserta cumi sambal dengan ongseng kacang panjang.



Warung Solo Bu Vera (3.5%)

Warung makan solo depan Gernang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan (FKIK) ini menyajikan banyak pilihan lauk bagi mahasiswa yang ingin membeli makanan di sini dengan harga yang murah. Dengan Rp8 ribu mahasiswa sudah dapat menyantap nasi beserta telur balado dan sayur labu.



Warung Solo Teh Yani (3.5%)

Hampir sama dengan Warung Solo Bu Vera, warung Solo yang berada di dekat Madrasah Pembangunan banyak dicari mahasiswa karena harganya yang bersahabat dengan kantong mahasiswa. Cukup dengan Rp7 ribu mahasiswa sudah dapat mengisi perut mereka dengan nasi dan lauk seperti ikan tongkol balado dan bihun goreng.

*Survei ini dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Institut dari 9-13 September 2016 kepada 200 responden dari mahasiswa UIN Jakarta. metode pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah *Propotionated Stratified Random Sampling*. Harga yang digunakan adalah harga terbaru pada 9-13 September 2016.

GAYA BARU MEDIA MENGOLAH BERITA

M. Rizky Rakhmansyah

79 Juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial (medsos). Lewat *social news site*, media dapat mengolah konten medsos menjadi berita.

APAKAH anda pernah berinteraksi dengan teman-teman lewat *Twitter* dan *Facebook*? Mengunggah foto di *Instagram*? Atau, menonton siaran langsung lewat *Periscope*?

Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi alasan hadirnya media sosial (medsos). Berkembang pesatnya alat komunikasi menjadi alasan pula medsos akrab bagi masyarakat Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2014 mencatat, 82 juta warga Indonesia aktif menggunakan internet. Tahun 2015, berdasarkan data *We Are Social*, sebuah lembaga agensi marketing sosial, mencatat pengguna internet di Indonesia sebesar 88,1 juta. 79 Juta diantaranya adalah pengguna aktif medsos. *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Periscope*, *Youtube* adalah beberapa medsos yang saat ini sering digunakan masyarakat Indonesia.

Namun, siapa sangka medsos dapat dimanfaatkan oleh media *online* untuk mengolah berita. Lewat konsep *social news site*, media *online* dapat menyeleksi beberapa status, foto, dan video dari medsos untuk dihimpun menjadi berita. Melalui konsep itu pula, media *online* berusaha menjalin

interaksi dengan pembaca.

Seperti yang dilakukan oleh *Rappler*. Media online yang dibentuk di Filipina tahun 2011 ini mencoba memanfaatkan konten-konten yang terdapat dalam medsos. Seperti *Twitter*, *Facebook*, *Periscope*, dan *Youtube*. “Bisa juga disebut *citizen journalism*,” terang wanita yang akrab disapa Uni Lubis ketika ditanya aplikasi konsep *social news site* di Kantor *Rappler*, Kamis (22/9/16).

Menggunakan *Periscope* misalnya. Lewat *Periscope*, *netizen*—sebutan untuk warga yang aktif menggunakan internet—dapat melihat video yang memuat peristiwa-peristiwa terbaru terjadi di Indonesia.

Contohnya saja pada aksi damai yang terjadi 4 Desember 2016 lalu. Peristiwa ini dapat diakses

melalui akun *Periscope* dan *rappler.com*. *Website* ini menghimpun video terkait aksi 4 Desember 2016 atau biasa disebut *Aksi 412* di akun *Periscope*, *youtube*, dan *website* milik *Rappler* secara langsung.

Awalnya, *Rappler* menyeleksi kumpulan-kumpulan video yang tengah tersebar di beragam medsos. Lalu, sebelum video peristiwa *Aksi 412* dimuat di web dan *Periscope* *Rappler*, tim medsos meminta izin terlebih dahulu kepada pengguna akun lain yang membuat video tersebut.

Selain itu, *Rappler* juga menghimpun artikel yang disajikan oleh warga melalui *blog*. Artikel yang *Rappler* pilih biasanya adalah artikel yang bersifat informatif dan hiburan. Namun, sebe-

lum memuat artikel itu di *website* miliknya, terlebih dahulu *Rappler* meminta izin kepada pemilik akun dan redaksi *Rappler* akan mengeditnya.

Social news site merupakan gaya baru media dalam meramu informasi untuk disuguhkan kepada pembaca. Direktur Pemasaran *Rappler* Zulfiani Lubis mengatakan, *Rappler* biasanya memantau semua medsos untuk mengetahui isu apa saja yang tengah santer dibicarakan masyarakat.

Ia menegaskan, membangun interaksi dengan *netizen* merupakan salah satu kunci utama *Rappler* membangun konsep *social news site*. “Lewat interaksi tersebut kami berusaha membangun komunitas secara *online*,” kata wanita yang sering dis-

apa Uni itu.

Banyak cara untuk membangun interaksi dengan pembaca. Salah satunya dengan membuat acara bertajuk *Ayo Indonesia* untuk membangun komunitas secara *offline*. Lewat acara *Ayo Indonesia*, *Rappler* bekerja sama dengan beberapa lembaga maupun instansi. Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Seminggu setelah adanya isu bom di beberapa tempat di Jakarta, Uni Lubis segera menghubungi Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk mengadakan acara *Ayo Indonesia*. “Intinya Pak menteri agama mengingatkan bahwa sekarang itu paham radikal telah menjangkau anak-anak muda melalui sosial media,” ungkapnya. *Rappler* memilih UIN Jakarta sebagai tempat diseleng-

garakannya acara *Ayo Indonesia* lantaran hanya disana kredibilitas keilmuan agama diakui.

Sementara itu, Pakar media sosial Wisnu Prasetya sangat mendukung konsep *social news site*. Baginya, konsep *social news site* merupakan inovasi baru media dalam menyikapi perkembangan medsos di Indonesia. “Masih banyak media online yang hanya menjadikan medsos sebagai lahan sirkulasi berita saja, padahal bisa dimanfaatkan untuk hal lain,” kata Wisnu, Rabu (9/12/16).

Akan tetapi, Wisnu memperingatkan media untuk disiplin melakukan verifikasi ketika ingin menggunakan medsos dalam mengolah beritanya. Menanggapi hal tersebut, Uni Lubis juga mengatakan verifikasi menjadi standar utama *Rappler* memuat berita. “Kita selalu mengutamakan prinsip-prinsip jurnalistik,” tegas Uni.

Perkembangan media *online* saat ini seharusnya diimbangi pula dengan regulasi yang tersedia di Indonesia. Wisnu berharap, pemerintah dapat merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. “dalam poin tersebut harus dipertegas posisi media online dalam memanfaatkan dalam regulasi,” tutupnya.



Cerita Akulturasi dari Utara Lombok

Erika Hidayanti

Lombok tak melulu soal pantai. Keindahan dan kekayaannya hadir hingga di kaki gunung sekali pun. Tak hanya soal alam, pun budaya Lombok begitu banyak yang unik dan menarik. Komunitas Adat Bayan di Desa Karang Bajo, Lombok Utara salah satunya.



Foto: Erika/INS

DESA adat yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini masih menerapkan budaya leluhurnya sampai sekarang. Desa adat yang dihuni oleh Suku Sasak-Bajo ini semuanya menganut agama Islam. Ritua-ritual agama di sini pun masih kental dengan berbagai ritual dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh kebiasaan leluhur mereka.

Kepercayaan Islam yang ada di Bayan juga masih dipengaruhi oleh beberapa budaya Hindu, karena dahulu daerah tersebut pernah dijajah oleh Karang Asem, Bali. Akulturasi Islam dan Hindu di Bayan pun menjadi salah satu hal unik. Hal ini pun bisa terlihat dari cara berpakaian dan beberapa aktivitas masyarakat Bayan.

Dari segi berpakaian, masyarakat Adat Bayan selalu memakai kain yang ditunen sendiri oleh wanita-wanita di sana. Akulturasi dalam pakaian akan terlihat pada ikat kepala yang dipakai oleh pria di Bayan. Jika masyarakat Hindu Bali memakai ikat kepala yang disebut *udeng* maka Islam Bayan menggunakan ikat kepala yang coraknya mirip dengan sebutan *sapu*.

Ritual agama masyarakat Bayan pun masih dipengaruhi oleh kebiasaan saat dijajah oleh Karang Asem. Di masa penjaja-

han Karang Asem, masyarakat Bayan dilarang melakukan segala kegiatan atau ritual agama Islam. Kegiatan-kegiatan agama seperti salat di masjid pun hanya diperbolehkan untuk kiai atau ulama besar. Maka pelaksanaan Idulfitri pun tak bisa dirayakan masyarakat Bayan.

Hal ini membuat masyarakat Bayan saat itu hanya dapat merayakan Idulfitri pada hari keempat setelah hari Idulfitri sebenarnya. Pada hari keempat itu dianggap bahwa prajurit-parjurit Karang Asem sudah mulai lengah mengawasi sehingga mereka dapat merayakan Idulfitri. Namun, sejarah ini berdampak hingga saat ini, sehingga masyarakat Bayan selalu merayakan Idulfitri pada hari ke empat.

Masjid Kuno dan Maulud Adat

Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Bayan adalah Masjid Kuno Bayan Beleq. Meski dinamakan masjid, namun fungsi dari masjid tersebut tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid Kuno Bayan hanya dipakai pada hari-hari besar atau hari-hari keagamaan tertentu saja. Selain itu yang boleh masuk ke masjid ini hanyalah kaum pria.

Masjid Kuno ini dibangun dari batu dan kayu, serta masih memiliki lantai tanah. Sama seperti bangunan lainnya masjid ini pun memiliki atap yang terbuat dari ilalang kering. Masjid ini diperkirakan dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Saat Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen masuk ke Bayan.

Masjid Kuno Bayan itu dikelilingi oleh makam para kiai yang membawa Islam pada zaman dahulu. Selain itu, juga terdapat beberapa cungkup makam. Makam tersebut dibuat seperti rumah dari *bedek* (dinding dari bambu). Saat berkunjung ke sana, ada salah satu makan yang rusak namun belum diperbaiki. Menurut keyakinan di sana, perbaikan makan tersebut bukan hal mudah sehingga harus dibicarakan dulu secara adat dan hanya warga adatnya lah yang berhak memperbaiki maka tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Masjid Kuno Bayan ini hanya digunakan saat ritual-ritual adat di hari-hari besar tertentu. Salah satunya adalah saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pekarangan masjid tersebut akan jadi tempat berkumpulnya hampir seribu masyarakat adat untuk menyaksikan ritual-ritual Maulud Adat.

Dalam prosesi Maulud Adat, masyarakat Bayan biasanya melakukan permainan yang disebut dengan *presean*. Permainan ini dilakukan oleh dua orang *perpadu* yang terdiri dari dua warga pria yang sebelumnya telah memiliki nadzar untuk bertarung saat Maulud Adat. Dua orang pria tersebut kemudian bertarung di halaman Masjid Kuno Bayan, disaksikan oleh semua masyarakat adat. Mereka bertarung menggunakan rotan (*Temetian*) sebagai alat pemukul dan perisai dari kulit sapi sebagai pelindung.

Peraturan lain dalam permainan ini adalah yang kalah adalah dia yang tak bisa melindungi bagian kepala dan lehernya. Ketika bagian leher atau kepala sudah terluka itu artinya pemain sudah dikatakan kalah. Namun, meski badannya sudah banyak luka jika kepala atau leher belum terluka pemain belum bisa dinyatakan kalah.

Permainan yang dihelat di halaman masjid ini tidak didasari dendam. Sehingga, setelah permainan selesai kedua pemain saling bermaafan. Meski ada salah satu yang terluka harus saling memaafkan dan tidak boleh menaruh dendam. Permainan ini hanya sebagai hiburan dan acara adat saja.

Hal unik lain dari prosesi Maulud Adat adalah berkumpulnya hampir seribu warga di halaman Masjid Kuno yang luasnya hanya sekitar 50m². Meski terbilang sempit untuk menampung banyaknya warga, setiap tahunnya acara Maulud Adat selalu sukses digelar di sana. Keyakinan lah yang membuat masyarakat adat tersebut bisa melakukannya.

Itulah sedikit cerita tentang budaya di kaki Gunung Rinjani, utara Lombok yang menyimpan keindahan tak hanya alamnya, namun budaya asli yang unik dan patut dilestarikan.



Foto: Erika/INS



Foto: Erika/INS



Foto: Erika/INS

Memaknai Goresan Juang Kemerdekaan

Triana Sugesti

Jejak kemerdekaan RI masih tergambar jelas di dalam bingkai lukisan maestro. Ini kali pertama khalayak umum menyaksikannya.

NAMPAK dari halaman depan, antrian panjang memadati ruang tunggu pameran. Para pengunjung sedang menunggu panggilan nomer antrian masuk ruang pameran. Sembari berdiri dan mengipas-ngipas kertas pamflet yang berada di tangan pengunjung.

Kerumunan itu berdesakan merubung sang kurator Mikke Susanto, untuk mendengarkan penjelasan sebuah lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. “Lukisan ini melambangkan nasionalis ala Jawa,” ujar Mikke kepada para pengunjungnya, Minggu (26/8/16).

Tepat berada di samping lukisan tahun 1857 itu, Mikke bercerita, lukisan ini terinspirasi dari pelukis Belanda bernama Nicholas Pienemaan yang bertajuk *penyerahan diri Dipo Negoro kepada letnan jenderal H.M. De Kock, 28 Maret 1930*. Si pelukis, Raden Saleh, memberi gambaran tentang dramatisasi hidup sang pangeran di depan tentara penjajah. Hal ini tergambar pada judul dan sikap yang tertera dalam diri pangeran Diponegoro di lukisan tersebut.

Di lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro, nampak salah seorang memakai pakaian serba putih dilengkapi serban berwarna hijau, tengah dijemput serombongan tentara penjajah.

Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu tertunduk lesu. Tak jarang dari mereka meneteskan air mata menyiratkan rasa sedih yang mendalam.

Lukisan berukuran 112x179 cm ini mengandung makna ketidaksukaan pelukis atas perlakuan penjajah di Jawa, pelukis di sini berperan sebagai saksi kejadian pada saat itu. Karena itu Raden Saleh juga melukis dirinya di dalam lukisan tersebut. “Raden Saleh memakai pakaian adat dengan blangkon batik,” ungkapnya.

Kerumunan itu semakin tegun menyimak cerita Mikke soal jati diri Raden Saleh. Yaitu, salah satu pelukis kebanggaan dunia yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pemuda kelahiran tahun 1981 ini, sudah lama dianggap sebagai pelopor seni rupa modern Indonesia.

Kemudian berjalan menyusuri ruangan, tepat di sudut sebelah kanan terdapat dua lukisan yang sama. Hanya saja, satu lukisan utuh terpampang di dinding ruangan dan satunya posisinya tidur sedikit rusak serta di kelilingi oleh bilik kaca bening.

Lukisan dengan judul Memanah, menggambarkan seorang pemuda gagah nan berani memegang anak panah tengah bersiap memanah. Dengan raut muka pemberani dan siap untuk menyerang tergambar jelas dalam



lukisan karya Henk Ngantung.

Awalnya, lanjut Mikke, untuk pertama kali Soekarno melihat lukisan ini pada tahun 1944, tepatnya pada pameran yang diadakan *Keimin bunka sidhoso, Jakarta*. “Lukisan bagus, ini sebuah simbol bangsa Indonesia yang terus, terus, dan terus bergerak maju, kata Soekarno.” tiru Mikke.

Mike bercerita, setelah pameran usai, Soekarno diam-diam meminta untuk membeli lukisan

tersebut. Namun dikarenakan lukisan belum sempurna dan Henk membutuhkan model, Soekarno pun langsung mengajukan diri untuk menjadi model. Berselang satu jam, lukisan selesai dan dibawa menuju rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomer 56, Jakarta, pada saat itu.

Lalu, secara kebetulan lukisan ini dipakai sebagai latar belakang pembacaan proklamasi kemerdekaan RI. Menariknya

secara formal mengonsepsi lukisan ini sebagai latar belakang acara konferensi pers perdana bagi bangsa yang baru merdeka.

Seiring dengan berjalannya waktu maka kondisi lukisan yang menggunakan medium tripleks ini telah uzur dimakan waktu. Sehingga diperlukan upaya pelestarian. Untuk itu karya ini lalu direproduksi yang dikerjakan oleh pelukis kenamaan yaitu, Haris purnomo.

Kedua lukisan itu dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, guna menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71. Istana kepresidenan RI menggelar pameran sejumlah koleksi lukisan yang bertajuk “17/71: Goresan Juang Kemerdekaan” diresmikan tanggal 2 Agustus, lalu dibuka untuk publik mulai tanggal 2 hingga 30 Agustus.

Pameran koleksi lukisan Ista-



Foto: Geti/INS

na Kepresidenan yang terselenggara atas kerja sama Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ekonomi kreatif dan Mandiri Art, merupakan kali pertama pameran diselenggarakan sejak Indonesia merdeka. Pagelaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karya besar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Pameran terbagi dalam tiga sub tema, tema pertama adalah potret tokoh penting seperti halnya lukisan karya Basoeki Abdullah, Affandi, Diego Rivera, Dullah, Gambiranom Suhardi, Hendra Gunawan, Henk Ngantung, Ida Bagus Made Nadera, Kartono Yudhokusumo, Mahjuddin, Miguel Covarrubias, Raden Saleh,

Johan Rudolf Bonnet, Soedjono Abdullah, Srihadi Soedarsono, Surono, Trubus Sudarsono, dan Waltr Spies. Tema kedua, kondisi sosial masyarakat masa revolusi karya Harijadi Sumadidjaja, S. Sudjojono dan Soekarno. Tema terakhir, yakni ke-Nusantaraan seperti karya Lee Man Fong.

Pameran ini menjadi penggambaran perjalanan sejarah RI yang menyajikan 28 lukisan dari 20 pelukis, dan 1 presiden yang melukis. Karya-karya maestro ini menghadirkan sarat makna yakni perjuangan hidup, pergolakan terhadap situasi yang mencekam, hingga gambaran tentang nilai-nilai kepahlawanan yang hadir pada pribadi masing-masing.

Kepala Pameran dan Kermitraan Galeri Nasional, Zam-

rud Setya Negara mengatakan sangat senang melihat antusias masyarakat Indonesia dengan diselenggaranya pameran itu. "Sangat dan sangat luar biasa pengunjungnya," ungkapnya.

Hal ini, tambah Zamrud, kali pertamanya ada pagelaran pameran yang terlengkap dan tepercaya. Menurutnya, tata letak yang tersistem, penerapan sistem edukasi bagi pengunjung yang tidak boleh memegang karya, pun berfoto menggunakan cahaya kamera.

Zamrud bercerita, Sejak presiden soekarno mengoleksi sejumlah lukisan dan benda-benda seni di masa penjajah hingga kini. Karya yang mulanya hanya bisa dilihat segelintir orang sekarang menjadi tonton publik. "Ini men-

jadi pegelaran perdana sejak 71 tahun lalu," tuturnya.

Menurutnya, acara ini bertujuan mengajak masyarakat untuk tidak saja mengagumi lukisan karya Maestro tapi juga mengajak relung-relung peradaban yang beragam dan memaknai pahit getirnya perjuangan.

Salah satu pengunjung, Amalia Rahmawati mengatakan pameran kali ini sangat menarik karena gambar yang dipamerkan hal yang langka. "Namun sayang, antrian panjang dan membosannya menjadi nilai minus dari pameran ini," ungkap mahasiswa Universitas Indonesia.



Foto: Geti/INS

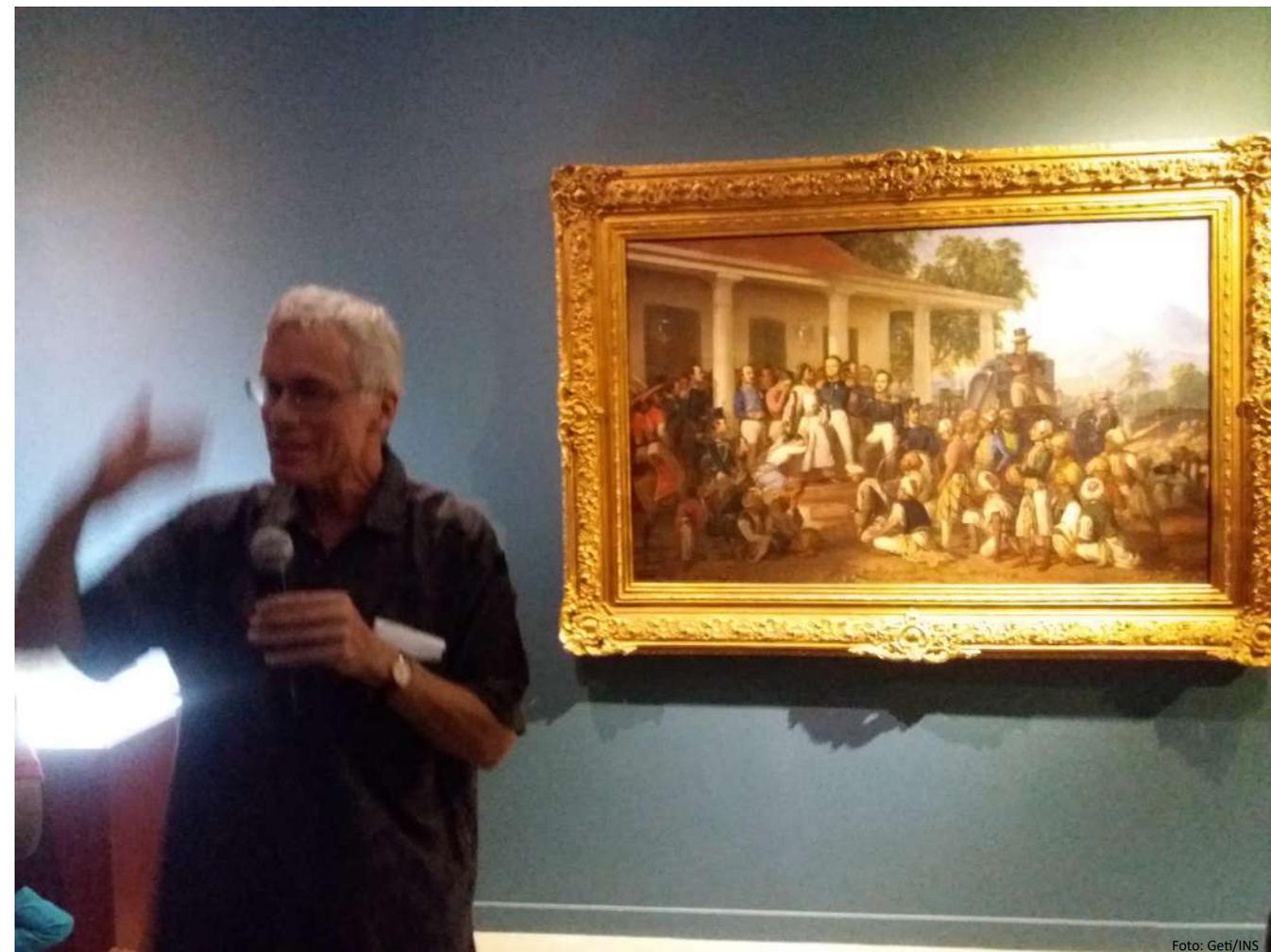


Foto: Geti/INS

Gorengan Puitis

Oleh Fajar Nurrahman*

Cerita ini dimulai saat saya asyik menggarot gorengan yang katanya paling nikmat seantero universitas ini. Ya, cuma gorengan, yang biasanya dicibir oleh orang yang bergaya hidup sehat ataupun *bule* dengan makanan yang berkolesterol, berminyak dan sungguh tidak sehat. Katanya bahkan bisa menyebabkan kanker. Entah kenapa penganan khas ini selalu dituduh subversif: sebagai pembawa penyakit, *bikin* gemuk, dan sebagainya. Padahal, menurut saya kudapan ini sungguhlah penyelamat dari kelaparan. Cepat saji, hangat, dan yang paling penting, murah harganya. Sebenarnya gorengan sama saja dengan makanan cepat saji yang disajikan di restoran waralaba dunia itu (lemak dan kolesterol), cuma mungkin standar higienis, iklan yang sangat menarik dan blablabla nya lebih baik. Saat gorengan di kantong kertas itu sudah habis, saya mencari-cari remah-remah gorengan yang biasanya berceceran di bagian bawah kantong itu. Saya pun merobek kertas yang berminyak itu dengan hati-hati agar tidak tumpah, soalnya remah-remah itu adalah harta yang sangat berharga bagi saya, saya tidak mau rugi sepotong kecil pun. Saya ingin merampas ampas-ampas gorengan itu agar terserap menjadi gizi dan energi untuk membantu saya membunuh hari.

Gorengan Pak Suwir itu memang sungguh *asoy*. Selalu ludes jam 5 sore, padahal dia baru mu-

lai dagang jam 3 sore. Itu adalah sebuah prestasi dalam hal durasi berjualan gorengan. Biasanya tukang gorengan saat malam hari masih memiliki sisa-sisa gorengan yang tidak laku, menjadi dingin dan tidak enak dan biasanya akan digoreng kembali untuk esok hari. Tapi gorengan Pak Suwir selalu *habis..bis..bis*. Mungkinkah ada semacam bumbu tambahan di dalam adonan gorengannya tersebut? atau dia mencampur dengan obat-obatan tertentu semacam zat adiktif supaya konsumennya ketagihan. Dia selalu saja menjawab dengan logat Jawa Tengah yang khas “Biasa aja ini mas, *ndak* ada resep-resep khusus ala-ala *syef* (mungkin maksudnya *chef*) gitu loh mas”. Sungguh saya tidak percaya. Pernah suatu ketika dua teman saya datang membawa masing-masing sebungkus gorengan, yang satu gorengan Pak Suwir yang satu lagi bukan. Kami masing-masing berpendapat bahwa gorengan Pak Suwirlah yang paling enak. Maka agar lebih ilmiah dan mengurangi subjektifitas, kami mencoba beli berbagai gorengan dari berbagai tempat dan membandingkannya, dan menurut penelitian asal-asalan itu gorengan Pak Suwirlah juaranya. Dan kami pun menjadi penasaran dan menempelkan mitos-mitos kecil bahwa gorengan Pak Suwir mengandung obat-obatan atau zat adiktif membuat kami *sakaw* gorengannya.

Suatu hari, ketika persediaan beras saya habis, saya pergi ke toko kelontong *Koh Afuk* yang berjarak

212 meter dari kamar kontrakan saya. Dan saya melihat Pak Suwir keluar dari toko sambil membawa satu bungkus plastik hitam besar. Kemudian saat saya membayar beras kepada *Koh Afuk*, saya pun iseng bertanya kepadanya apa saja yang dibeli Pak Suwir. “Biasa lah.... Minyak goreng, tepung terigu. Buat dagangan dia *gitu*” ujarnya. Saya pun bertanya-tanya lagi kepada hal yang lebih spesifik, si *Ngkoh* pun memberi saya nota belanjanya Pak Suwir. “Nih *lu liat* aja sendiri” ujarnya dengan sedikit kesal.

Nota Toko Cahaya

Tepung Terigu Cap
“Segitiga Bulet Kotak X”
5Kg Rp.50.000,-
Minyak Goreng Cap
“Orangutan”
5Lt Rp.50.000,-
Rokok Cap
“Koboi Clint Eastwood”
1Bk Rp.12.000,-
Total Rp.112.000,-

Sungguh, itu cuma tepung terigu murah biasa, minyaknya pun sama. Pun rokoknya juga rokok yang biasa dihisap rakyat jelata pada umumnya. Saya pun malah berpikir tentang iluminati karena kesamaan antara logo segitiga tepungnya dengan segitiga freemason, yang sungguh sangat tidak objektif untuk penelitian saya ini.

krauk...krauk...krenyesss...nyess
Kembali pada posisi saat saya

dengan hati-hati merobek bungkus gorengan agar remah-remah atau *krenyes-krenyes-nya* bisa saya habiskan seperti di paragraf pertama. Kertas yang sudah ditembusi minyak itu saya robek perlahan dan membuka lipatan-lipatan kertasnya, lalu menjejerkannya dan menekan-nekan-nya supaya lebih lurus seperti meluruskan uang kusut. Huruf-huruf dalam bungkus gorengan yang sudah tidak jelas karena minyak yang sudah merembes dan sebagainya itu, saya lihat susunannya terlihat seperti bait-bait puisi. Saya pun mencoba membacanya dengan lebih jelas, dan memang ternyata itu adalah puisi. Keesokan harinya saya pun setelah merobek bungkus gorengan itu saya lihat isinya adalah puisi, dan lusa pun demikian, ternyata isi kertas yang digunakan sebagai kantong gorengannya berisi puisi.

Akhirnya setelah mendapatkan bukti-bukti yang lumayan empiris itu, saya pun menanyai Pak Suwir saat membeli gorengannya.

“Pak, kok bungkus gorengannya tulisannya puisi *sih*, beli dimana nih?”

“oh, itu saya beli *kiloan* dari orang”

“Tapi kenapa puisi? Mungkin ini *nih* rahasia gorengan bapak yah”

“*Lah ndak tau* ya hehehe, oh iya ya. Mungkin juga sih, biasanya saya juga beli kertas bekas kiloan, selalu kertas HVS, soalnya kan lebih bagus ketimbang kertas koran. Biasanya kalo beli isinya kertas skripsi-*krispi repisi* eh apalah gitu, kertas ujian juga. Tapi akhir-akhir ini *dapetnya* kertas puisi ini kayak gini. Eh *trus* mungkin juga kali mas *kalo* pake kertas puisi malah laris manis begini gorengannya tuh hehehehehe”. Ketawa Pak Suwir sambil memberi saya sebungkus gorengan hangat. Kemudian saya

pun bertanya tentang siapa penjual kertas bekas berisi puisi itu, dan ia memberi tahu alamatnya.

Sebenarnya penjual kertas puisi itu juga mahasiswa seperti saya, seorang perempuan berwajah sayu berumur dua puluhan awal. Saya pun berkesempatan mengobrol bersamanya. Ia langsung mau diajak *ngobrol* atau wawancara saat saya bilang saya tahu puisi-puisinya yang berada di dalam bungkus kertas gorengan. Sebenarnya saya kurang jago membuat dialog-dialog percakapan, maka saya akan merangkum ceritanya dibawah ini:

Saya suka sekali menulis puisi. Entah kenapa, padahal orang tua saya tidak ada yang penyair. Sejak kecil saya suka menulis puisi, tentang apapun. Saat remaja saya sering mengirim puisi-puisi ke beberapa surat kabar, majalah dan lomba-lomba puisi. Pertama-tama mereka menaruh puisi-puisi saya di kolom mereka namun kelamaan menjadi jarang. Mungkin karena saya terlalu banyak mengirim puisi hingga memenuhi kotak surat mereka. Saya terus menulis puisi walaupun tidak digubris orang. Tapi produksi puisi saya sungguh berlebih, dalam sehari saya bisa membuat berpuluh-puluh lembar puisi. Hingga lama kelamaan kamar tidur saya pun penuh dengan kertas-kertas puisi. Ibu saya mengomeli saya untuk membuang kertas-kertas tersebut. saya pun memahami bahwa puisi tidak harus masuk koran atau majalah saja, saya harus mencari tempat tinggal yang baru untuk puisi-puisi saya.

Pertama saya menyebarkan puisi-puisi saya di jalanan seperti *SPG* sepeda motor menyebarkan selebaran-selebaran harga motor-motornya. Tapi kemudian saya disangka menyebarkan

selebaran-selebaran sesat oleh preman-preman. Kemudian saya memasukkan puisi saya dalam amplop dan mengirimkannya ke alamat-alamat yang saya dapat dari majalah di rubrik mencari sahabat pena, hingga akhirnya saya kehabisan uang untuk membeli amplop dan perangko. Pernah juga saya membakar puisi-puisi saya supaya ia bisa terbang ke atmosfer sana dan hinggap di lain benua dan mengelilingi dunia, tapi menurut *Discovery Channel* itu malah merusak lingkungan. Lalu, saya juga pernah menanam puisi-puisi saya di tanah supaya menjadi pupuk bagi pepohonan, tapi pepohonan di sini sudah jarang. Akhirnya ibu saya menyuruh menjual kertas-kertas itu ke tukang loak, tapi saya memberikan kertas-kertas puisi saya ke Pak Suwir yang tukang gorengan itu. Awalnya ia membayar, tapi lama kelamaan saya berikan cuma-cuma. Karena saya yakin puisi-puisi saya berguna sebagai wadah makanan buat orang-orang yang kelaparan. Itu lebih fungsional menurut saya, dan saya yakin puisi saya meresap saat minyak dari gorengan itu bercampur dengan tinta puisi saya, dan secara tidak sadar puisi saya pun tersampaikan ke orang banyak.

Saya sebenarnya tidak begitu suka puisi, pun tidak begitu mengerti puisi. Tapi investigasi saya yang menggelikan ini membuat saya percaya bahwa puisi itu sungguh *asoy geboy maknyos*.

Saya jadi ingin membuat lapak dagangan di dekat kampus, dengan bungkus puisi-puisi, mungkin nanti namanya “Tahu isi Puisi”.

* *Mahasiswa UIN Jakarta semester banyak yang berdagang buku online dan ikut-ikutan komunitas Rusabesi*

Oleh Fakhri Hermasnyah/KC

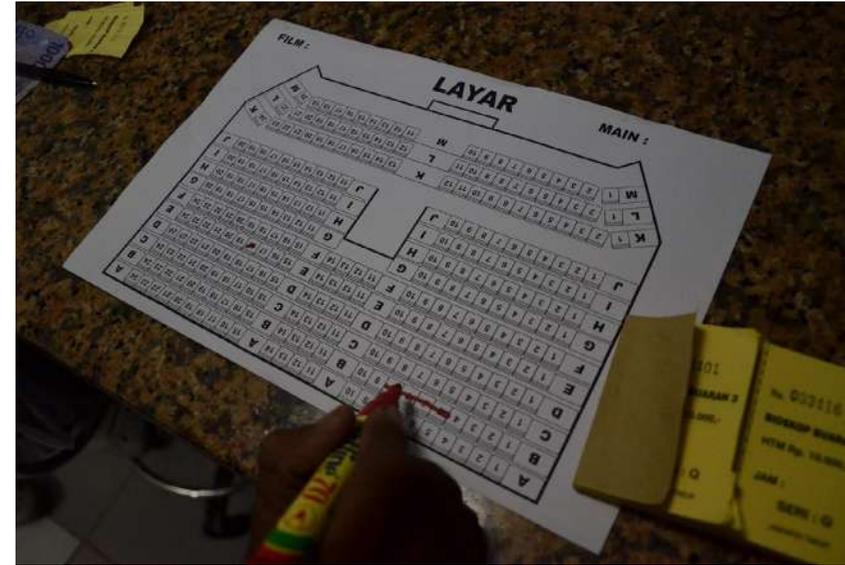


Suara putaran mesin reel film 35mm terdengar di ruang operator Buaran Theatre, Jakarta Timur. Ketika gulungan film habis, operator segera mengganti dengan gulungan berikutnya. Mesin yang dioperasikan oleh 4 orang ini baru mulai beroperasi pukul 1 siang.

Bioskop yang berdiri sejak tahun 1985 menjadi saksi bisu era kejayaan film Indonesia. Film seperti Petualangan Sherina, Ayat-ayat Cinta, dan Laskar Pelangi jadi tontonan favorit masyarakat. Buaran Theatre kala itu tak pernah sepi penonton lantaran menawarkan harga karcis seharga Rp.10 ribu pada hari biasa dan Rp.15 ribu pada hari libur. Harga tersebut pun tetap bertahan hingga sekarang.

Sayangnya, Buaran Theatre saat ini tak seramai zaman keemasan film dalam bentuk gulungan reel film 35mm. Abdul Ajis (56), salah satu kordinator operator menceritakan saat ini Buaran Theatre rata-rata hanya dikunjungi 10 orang penonton tiap harinya. "Sekarang beda, dulu setiap kali ada penayangan film, 80 orang sudah berada di kursi studio," ujar Agus.

Berkurangnya penonton Buaran Theatre disebabkan arus digital yang membuat film dalam bentuk gulungan reel film 35mm kurang diminati rumah produksi film. Padahal, Buaran Theatre memiliki fasilitas sama dengan bioskop pada umumnya.





Ika Puspitasari



M. Rizky Rakhmansyah



Erika Hidayanti



TIM MAJALAH 42



Triana Sugesti



Arini Nurfadilah



Yasir Arafat



Jeannita Kirana



Syah Rizal

PELANTIKAN PENGURUS & ANGGOTA 2016



KUNJUNGAN REDAKSI MEDIA NASIONAL



PENGUKUHAN CALON ANGGOTA 2016



JALAN-JALAN MEN



PELATIHAN JURNALISTIK TINGKAT LANJUT LPM INSTITUT



PENGANUGRAHAN ISPRIMA 2016

PELANTIKAN PENGURUS & ANGGOTA 2016



KUNJUNGAN REDAKSI MEDIA NASIONAL



TRAINING PERS INSTITUT



BERITA CEPAT

BELUM TENTU TEPAT

BISA JADI

HANYA

HOAX